

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

Renstra ini merupakan tahap penyusunan Renstra yang akan menjadi acuan bagi Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanian, pangan, tanaman pangan, dan hortikultura jangka 5(lima) tahun. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini telah dapat menguraikan arah atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Dokumen ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis tahun sebelumnya dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Tahun 2025 – 2029.

Kami menyadari bahwa tantangan di sektor pertanian semakin kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang inovatif untuk meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas, dan kesejahteraan petani di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan dapat menguraikan rencana jangka menengah yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya bersama untuk memajukan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Harapan kami, semoga Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Riau.

Pekanbaru, Oktober 2025

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi Riau

Wiwik Suryana, STP, M.Si.

NIK 1984030122002



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	 8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	 8
2.1.2.Sumberdaya Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	29
2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.4.Kelompok Sasaran Pelayanan.....	44
2.1.5.Mita Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	45
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	46
2.2.1.Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.2.2.Isu Strategis Perangkat Daerah	52
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 58
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	58
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	60
3.3 Strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	67
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	72

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN	78
4.1 Uraian Program	78
4.2 Uraian Kegiatan	79
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	95
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	121
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	123
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	124
BAB V. PENUTUP	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Kaidah Pelaksanaan	126
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.....	29
Tabel 2.2.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Jabatan.....	29
Tabel 2.3.	Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per 1 Januari 2025).....	30
Tabel 2.4.	Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin (Per 1 Januari 2025).....	31
Tabel 2.5.	Data Sarana Prasarana	32
Tabel 2.6.	(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	34
Tabel 2.7.	Jumlah Kecamatan Rentan Pangan.....	36
Tabel 2.8.	Perkembangan Luas Panen Sayur-sayuran di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024	39
Tabel 2.9.	Perkembangan Luas Panen Buah-buahan di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024	40
Tabel 2.10.	Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024	42
Tabel 2.11.	(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Sumber APBD dan APBN.....	43
Tabel 2.12.	Jumlah Kelompok Wanita Tani	44
Tabel 2.13.	Mitra Pelayanan Dinas PTPH	45
Tabel 2.14.	(Tabel 2.1 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	52
Tabel 3.1.	(Tabel 3.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau.....	59
Tabel 3.2.	(Tabel 3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) Penahapan Renstra	60
Tabel 3.3.	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.	70
Tabel 3.4.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.	72
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau	79
Tabel 4.2.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan.....	82
Tabel 4.3.	Rencana/Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	95

Tabel 4.4.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	121
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama	123
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.	2
Gambar 1.2.	Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 3.1.	Cascading Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Kecamatan Rentan Pangan 2020 - 2024.....	37
Grafik 2.	Produksi Padi 2019 - 2024	37
Grafik 3.	Produksi Durian 2019 - 2024	38
Grafik 4.	Produksi Cabai dan Bawang Merah 2019 - 2024.....	38
Grafik 5.	Produksi Jagung 2019 - 2024.....	41

1.1 LATAR BELAKANG

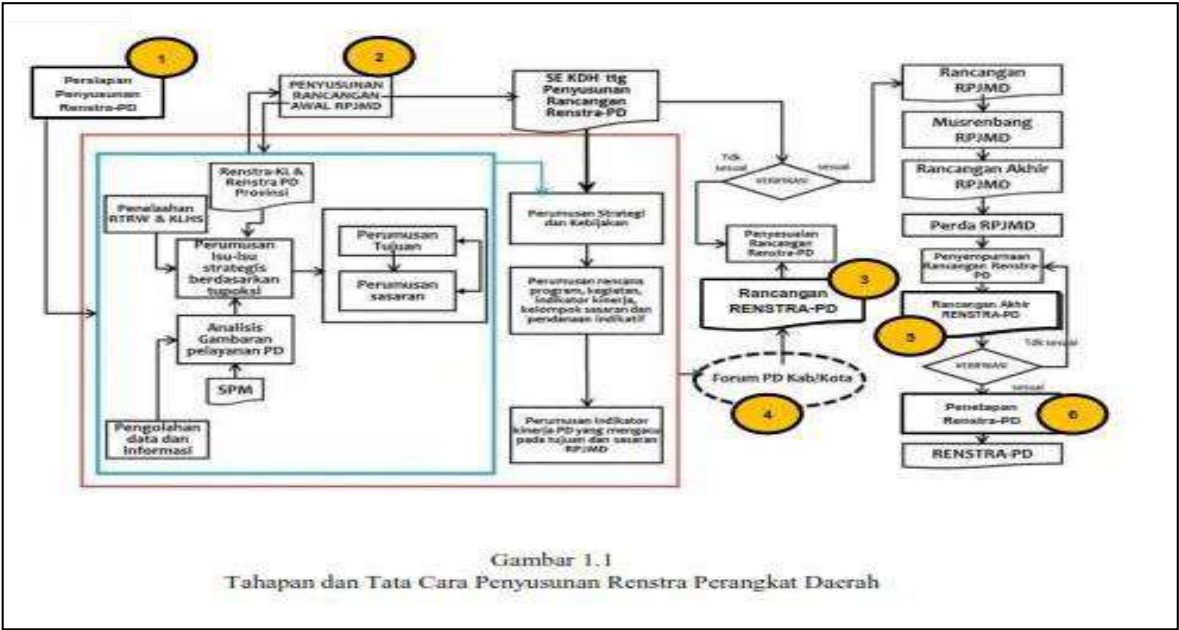
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud sebagai turunan dari dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

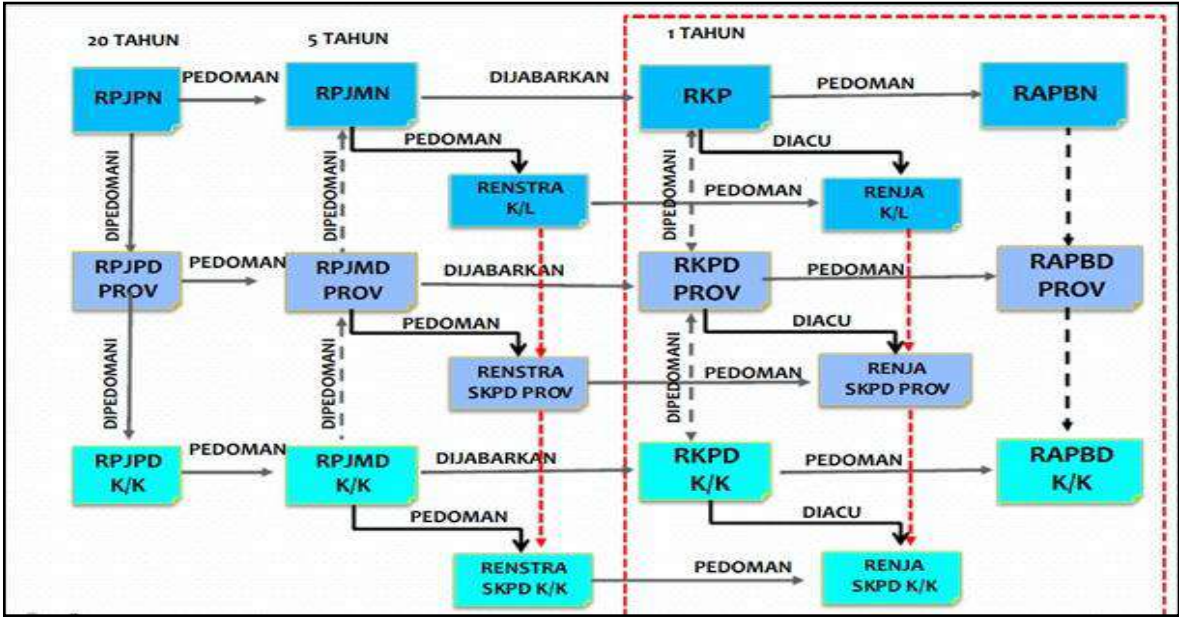
Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah disusun sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Berikut diagram tahapan dan tata cara penyusunan Renstra perangkat Daerah :

Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, serta Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selanjutnya proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi pengawasan termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka memantau sejauh mana target yang ditetapkan dapat dicapai pada tahun yang bersangkutan. Sehingga sangat penting untuk mengevaluasi RENSTRA

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pengawasan.

1.2 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 10) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) (Khusus Perangkat Daerah terkait TPB);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Nasional Tahun 2025 Nomor 19)
- 12) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 14) Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 20) Perda Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3);

- 21) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2025);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
- 24) Peraturan Gubernur Riau No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 42);
- 25) Peraturan Gubernur Riau No 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 43);
- 26) Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor: 53)
- 27) Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor: 54)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Renstra ini disusun secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan hasil evaluasi terhadap Renstra sebelumnya. Sementara itu, tujuan dari Renstra ini adalah:

1. Untuk mencapai kinerja lima tahunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029;

4. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029; dan
5. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penyusunan RPJMD memuat :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
 - 2.1.2. Sumberdaya Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029
- 3.3. Strategi Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

- 
- 3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 -2029 melalui Indikator kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2024 Nomor 2025) yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 42), serta peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Bagian Ketujuh (pasal 159) menyebutkan bahwa Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyebutkan bahwa unit kerja yang terdapat pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

- 1) Bidang Ketahanan Pangan;
- 2) Bidang Tanaman Pangan;
- 3) Bidang Hortikultura ;
- 4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, (Kelas A);
- 2) UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, (Kelas A);
- 3) UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (Kelas A); dan
- 4) UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, (Kelas A).

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif untuk selanjutnya melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya yang pertanggungjawabannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

- 
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi, dalam rangka pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Pembinaan dan penyusunan pelaksanaan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis perencanaan program, keuangan, pengelolaan asset dan perlengkapan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan perangkat daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan, penganggaran dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertanggungjawaban anggaran, pelaporan keuangan dan pelaporan asset, pelaporan penerimaan PAD, dan pemeliharaan asset perangkat daerah, serta penyiapan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyiapan dokumen rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan dan diluar penguasaan yang tercatat pada KIB dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pelaksanaan proses administrasi perbendaharaan, verifikasi dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

- 
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program/kegiatan, anggaran dan keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta pendataan asset-asset lainnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1 Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

- 
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan tugas terkait ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan pengolahan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, standar operasional prosedur Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data dan analisis ketersediaan, akses, harga pangan dan distribusi pangan, prognosa ketersediaan pangan, penyusunan Neraca Bahan Makanan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pencegahan, pengendalian dan fasilitasi masalah ketersediaan pangan pokok dan alternatif, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan pengembangan manajemen kelembagaan distribusi jaringan kerja sama dan pengembangan system informasi ketersediaan distribusi dan harga pangan;
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- h. Pelaksanaan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pencegahan, intervensi, dan pemberdayaan daerah rawan pangan;
- k. Penyiapan bahan rumusan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
- m. Pelaksanaan Koordinasi, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis mutu dan standarisasi pangan segar asal tumbuhan;

- n. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat pasar tradisional, modern dan menganalisis sampel serta melaksanakan pengembangan sistem pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah;
- o. Pelaksanaan pengembangan, kerja sama dan pembinaan sistem jejaring keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- p. Pelaksanaan identifikasi, pendataan dan analisis situasi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.
- q. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan, intervensi, edukasi, sosialisasi, promosi serta gerakan dalam rangka diversifikasi dan peningkatan mutu pangan dan gizi masyarakat;
- r. Penyiapan bahan perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;
- s. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- t. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis aneka komoditas pangan;
- u. Pelaksana penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil pangan;
- v. Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian budaya mengkonsumsi aneka olahan pangan;
- w. Pelaksanaan pembinaan peningkatan nilai tambah produk aneka olahan pangan potensi daerah;
- x. Pelaksanaan kerjasama rekayasa, peningkatan jenis dan mutu aneka olahan pangan;
- y. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan pangan; dan
- z. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait sereal, aneka Kacang-kacangan dan umbi-umbian, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/ kegiatan dan anggaran Bidang Tanaman Pangan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Tanaman Pangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Tanaman Pangan;
- d. Pembuatan rencana pemetaan dan analisa penyebaran varietas serta pola tanam serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- e. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan penerapan teknologi tepat guna tanaman serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- f. Pelaksanaan Bimbingan untuk peningkatan produktivitas dan produksi serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- g. Pelaksanaan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna produksi serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- h. Pelaksanaan peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait serealialia dan Aneka Kacang dan Umbi-umbian;
- j. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan alsintan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- k. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan alsintan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil;
- l. Pelaksanaan penyiapan analisis kebutuhan alsintan pasca panen dan pengolahan pemasaran hasil;
- m. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan sesuai standar GAP/ ISO yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan;
- n. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- o. Pelaksanaan fasilitasi promosi produk;
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Hortikultura

Bidang hortikultura menyelenggarakan tugas kordinasi, fasilitas, Pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait, tanaman buah-buahan dan tanaman hias, tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat, pengolahan dan pemasaran hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, Penyusunan, Pengusulan dan Pengembangan Rencana Program/Kegiatan Anggaran Bidang Hortikultura;
- b. Penyusunan Pelaksanaan Standar Operasional (SOP) dan pemetaan Hortikultura;

- c. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang hortikultura;
- d. Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman buah-buahan dan tanaman hias, tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna produksi tanaman buah-buahan dan tanaman hias, tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- g. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- h. Pelaksanaan penyiapan kebutuhan alat pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- i. Penyiapan bahan penerapan cara produksi produk hortikultura yang baik dan pemberian surat keterangan registrasi;
- j. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar hortikultura;
- k. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran produk hortikultura;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Hortikultura dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian, pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian, pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;
- c. Pelaksanaan identifikasi, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, antisipasi, bimbingan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana, dan Sarana Pertanian, pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;

- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian serta pembiayaan agribisnis, pupuk dan pestisida;
- e. Pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin pertanian kebutuhan pembiayaan pengolahan pangan, usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, pupuk dan pestisida;
- f. Pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan dan air serta tata ruang dan tata guna lahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (Kelas A)

UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Telcris, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- c. Penyelenggaraan keamanan pangan dan jaminan mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai instansi yang berwenang (otoritas yang berkompeten);
- d. Penyelenggaraan pengambilan dan pengujian sampel untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), uji laboratorium mutu pangan, keluhan konsumen dan pengawasan peredaran pangan segar;
- e. Penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Sehat (Health Certificatel), penyusunan standar mutu pangan, pengelolaan laboratorium mutu pangan;
- f. Penyelenggaraarr sertifikasi, pengujian dan pengembangan uji mutu pangan, pengawasan registrasi pangan segar;

- g. Penyelenggaraan pendaftaran rumah kemas (packing house) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), inspeksi dan survei verifikasi (surveillance) sampel mutu pangan serta penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

7.1 Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi pengawasan dan Pelayarlrl Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

7.2 Subbagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program /kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi adminstrasi kepegawaian, adminstrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha ; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7.3 Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis

Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- c. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pelayanan teknis;
- d. Mmelaksanakan adminstrasi pelayanan uji mutu pangan;
- e. Melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- f. Melaksanakan tindak lanjut keluhan konsumen terkait mutu pangan;
- g. Melaksanakan pengawasan pangan segar sebelum diedarkan;
- h. Melaksanakan penerbitan sertifikat sehat (health certificate);
- i. Melaksanakan penyusunan standar mutu pangan;
- j. Melaksanakan pelayanan uji laboratorium mutu pangan;
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7.4 Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan

Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi Mutu Pangan;
- c. Melakukan koordinasi sertifikasi, pengujian mutu (register), dan pengembangan uji mutu pangan dengan instansi dan stakeholder terkait;

- d. Melaksanakan pendaftaran rumah kemas (packing house) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- e. Melaksanakan inspeksi dan surveillance sertifikasi pangan;
- f. Melaksanakan penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (Kelas A)

UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian(KelasA) dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- c. Penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi, penguatan kapasitas dan pembinaan pelaku pertanian;
- d. Penyelenggaraan penyediaan bantuan pelatihan pada lembaga pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Pas (P4S)).
- e. Penyelenggaraan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
- f. Penyelenggaraan dan fasilitasi pertanian penyuluhan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi manajemen pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. Penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian;
- i. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

8.1 Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usala, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencaraa operasional pada upt pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan upt pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

8.2 Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Bebal Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- i. Melaksanakan administrasi dan akomodasi bagi penerima manfaat;
- j. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokoleran UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8.3 Seksi Pelatihan

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelatihan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan;
- c. Merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pelatihan pada Seksi Pelatihan;
- d. Melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan profesi pertanian;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;
- f. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan dalam instalasi pendidikan dan pelatihan (Inkubator Agribisnis (IA), Lahan Praktek, dan Laboratorirrm Pengolahan Hasil);
- g. Melakukan penumbuhan dan pengembangan lembaga pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya pas(P4S));
- h. Melakukan fasilitasi pengembangan standarisasi dan serffikasi Sumber Daya Manusia pertanian;
- i. Melakukan fasilitasi penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis pertanian;
- j. Melakukan fasilitasi evaluasi pasca pelatihan dan bimbingan lanjutan pelatihan pertanian;
- k. Melakukan pengembangan sistem dan metoda, model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis pertanian;
- b. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan; dan
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8.4 Seksi Penyuluhan

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyuluhan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan;
- d. Melakukan analisis kebutuhan teknis pensruluhan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, penilaian dan pemberian penghargaan pada pelaku utama dan pelaku usaha;

- 
- g. Melakukan penyusunan materi, bahan informasi, media dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian dalam rangka pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
 - i. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - j. Melakukan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - k. Melakukan kerjasama dan pemberian konsultasi dibidang pertanian;
 - l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).

UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan, pembinaan dan penumbuhan penangkar benih, serta pengembangan teknologi perbanyakan benih;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan benih sumber, koleksi dan pemeliharaan plasma nutfah;
- e. Penyelenggaraan pemberian pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyelenggaran pengawasan terhadap mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar, melakukan pengecekan mutu benih, dan memonitor data stock dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih;

- 
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

9.1 Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi pengawasan dan Sertifikasi Benih. Untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

9.2 Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- e. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- f. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- 
- i. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - j. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
 - k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9.3 Seksi Produksi Benih

Kepala Seksi Produksi Benih mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Benih;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi Benih;
- c. Melaksanakan produksi benih;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penumbuhan penangkar benih;
- e. Melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih unggul bermutu;
- f. Melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan benih;
- g. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan benih sumber;
- h. Melaksanakan kegiatan koleksi dan pemeliharaan plasma nutfah;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi produksi Benih; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9.4 Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Kepala Seksi Pengawasan dan sertifikasi Benih mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih;
- d. Melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengujian daya adaptasi galur (calon varietas unggul) tanaman pangan dan hortikultura semusim, observasi calon pohon/rumpun induk buah-buahan unggul dan pengujian kebenaran varietas dalam rangka persiapan pelepasan varietas atau pendaftaran calon varietas unggul baru;

- 
- f. Melaksanakan fasilitasi determinasi/penilaian terhadap pohon/rumpun induk tanaman sebagai sumber mata tempel (entres) untuk memperbanyak benih tanaman;
 - g. Melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Memfasilitasi kegiatan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, melakukan pengecekan mutu benih, dan memonitor data stock dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih;
 - i. Melaksanakan operasional pelayanan pengujian mutu benih;
 - j. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan terhadap produsen dan pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan ssfagan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.. Susunan organisasinya terdiri atas Kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman, Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida Dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan pengamatan, peramalan, inventarisasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan Dampak Perubahan iklim (DPT) serta pengembangan metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- e. Penyelenggaraan pelayanan, pengembangan teknik dan metoda pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;

- f. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- l. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

10.1 Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Dan Rencana Operasional pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

10.2 Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;

- 
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi, keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10.3 Seksi Perlindungan Tanaman

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman;
- c. Melaksanakan koordinasi perlindungan tanaman;
- d. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- e. Melaksanakan pengamatan, peramalan, inventarisasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim(DPI) serta pengembangan metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Tanaman; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10.4 Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan

Kepala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- d. Melaksanakan pelayanan pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Melaksanakan pengembangan teknik dan metode pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan; melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- f. Melaksanakan Surveillance Organisme pengganggu tumbuhan, eksplorasi serta pengembangan Agensi Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati;
- g. Melaksanakan penyusunan daftar organisme pengganggu tumbuhan (Pest List);
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

11. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan UPT dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didukung dengan 280 orang Aparatur Sipil Negara, dengan perincian sebagai berikut :

- i. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 173 orang atau 61,8 %, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah 45 orang atau 16,1 %.

Tabel 2.1.
Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	Persen (%)
1.	Gol IV	45	16,1%
2.	Gol III	173	61.8%
3.	Gol II	45	16.1%
4.	Gol I	0	0%
5.	Gol IX (PPPK)	8	2.8%
6.	Gol VII (PPPK)	1	0.4%
7.	Gol V (PPPK)	8	2.8%
Jumlah		280	100

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

- ii. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang berjumlah 280 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok sebagaimana data pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2.
Keadaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Jumlah
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
2.	Administrator (Eselon III)	9
3.	Pengawas (Eselon IV)	13
4.	Sub Kordinator	0
5.	Fungsional Keahlian	207
6.	Pelaksana (Staf)	33
7.	PPPK	17
Jumlah		280

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

iii. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 151 orang atau sebesar 54% diikuti SLTA/SMK/MA sebanyak 74 orang atau sebesar 26,4% dan Sarjana Strata II berjumlah 33 orang atau sebesar 11,8%. Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau cukup baik.

Tabel 2.3.
Keadaan Jumlah Pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per 1 Januari 2025)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana Strata III (S.3)	0
2.	Sarjana Strata II (S.2)	34
3.	Sarjana Strata I (S.1)	155
4	Diploma (1-4)	23
5.	SLTA/SMK/MA	62
6.	SLTP/MTS	4
7.	SD	2
Jumlah		280

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

iv. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Pembagian Jenis Kelamin.

Total jumlah aparatur PNS dan PPPK DPTPH Provinsi Riau Januari Tahun 2024 adalah sejumlah 280 orang yang terdiri dari 158 orang laki-laki (56,42%) dan 122 orang (43,57%) perempuan. Sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas berjumlah 199 orang yang terdiri 126 orang laki-laki (63.31%), Perempuan berjumlah 73 orang (36,68%). Pembagian komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Negara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan gender dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 2.4.
Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Riau Menurut Jenis Kelamin (Per 1 Januari 2025)

NO	BIDANG	PNS			THL			PPPK		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	25	15	40				-	-	-
2	BIDANG KETAHANAN PANGAN	6	8	14				-	-	-
3	BIDANG TANAMAN PANGAN	6	9	15				-	-	-
4	BIDANG HORTIKULTURA	9	8	17				-	-	-
5	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUH	14	5	19				-	-	-
JUMLAH 1		60	45	105				-	-	-
6	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI	28	22	50				2	1	3
7	UPT. PELATIHAN PENYULUH PERTANIAN	19	10	29				1	3	4
8	UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN (PERLINDUNGAN)	39	28	67				5	5	10
9	UPT. BALAI PENGAWASAN MUTU	4	8	12				-	-	-
JUMLAH 2		90	68	158				8	9	17
JUMLAH 1 & 2		150	113	263				8	9	17

Sumber: Daftar Kepegawaian Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2025

v. Asset/Modal

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, memiliki 2 (dua) gedung yang terdiri dari 1 (satu) gedung di Jalan Soebrantas no 4 Panam (gedung A), dan 1 (satu) gedung di jalan Kuantan (Gedung B). Gedung A terdiri dari 2 lantai, sedangkan gedung B memiliki 1 lantai dimana setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prarasana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

Tabel 2.5.
Data Sarana Prasarana

NO	SKPD	BARANG (Unit)	Keterangan
1.	Mobil Dinas	28	
2.	Sepeda Motor Dinas	63	
3.	Filling Cabinet	137	
4.	AC Spite	165	
5.	AC unit	20	
6.	Mesin Penghitung Uang	2	
7.	Mesin Absen	11	
8.	Mesin Penghancur Kertas	3	
9.	Lemari Kaca	27	
10.	Laptop/Notebook	66	
11.	PC Unit	118	
12.	Server	6	
13.	Printer	149	
14.	Scanner	10	
15.	Proyektor	15	
16.	Mesin Foto Copy	4	
17.	Videotron	0	
18.	Smartboard	0	
19.	Handy Cam	5	
20.	Kursi Besi	57	
21.	Kursi Rapat	389	
22.	Kursi Pegawai	794	
23.	Meja Kerja	145	
24.	Televisi	7	
25.	Soundsystem	7	
26.	Wireles	1	
27.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	
31.	Unit Power Supply	28	
32.	Kelengkapan Komputer	3	
33.	Lemari Buku	15	
34.	Camera	30	
35.	Tabung Pemadam	0	
36.	Exsos Fan	10	
37.	Dispenser	4	
38.	Kursi Tamu/Sofa	17	
39.	Mesin Air	46	
40.	Tangki Air	1	
Jumlah			

Catatan :

Bangunan Dinas : luas bangunan Gedung A hingga Desember 2023 seluas 1.812 m² dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA, ruang kerja : terdapat 14 ruangan kerja dan 1 mushola. Luas bangunan Gedung B hingga Desember 2023 seluas 1.812 m² dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA, ruang kerja : terdapat 14 ruangan kerja.

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, baik kegiatan fisik maupun non fisik, namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas perlu ditambah, terutama kendaraan roda empat double cabin for field (four wheel driver), mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan pertanian kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

2.1.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa Negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan ekonomi; mengurangi kemiskinan; menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2024 Nomor 2025), merupakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebelumnya yaitu periode Tahun 2021 – 2024 dapat disajikan pada tabel T-C. 23 berikut:



Tabel 2.6.
(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target *NSPK	Target *IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
	Urusan Wajib															
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	√	√		65,87	67,62	69,37	71,12	66,84	67,59	68,68	70,43	101,47	99,96	99,01	99,03
2	Skor PPH Ketersediaan (skor)		√		87,03	89,8	92,5	96	89,29	90,5	90,23	*	102,60	100,78	97,55	*
3	Skor PPH Konsumsi (skor)		√		87	89,7	92,3	95	84,1	89,4	88,9	88,14	96,67	99,67	96,32	92,78
4	Persentase peningkatan keamanan pangan segar (%)	√	√		5	5	5	5	-1.86	4,34	4,35	4,65	*	86,80	87,00	93,00
5	Persentase Wilayah Rentan Pangan (%)	√	√		26,62	25,44	23,07	21,3	12,43	36,11	36,11	25	46,69	141,94	156,52	117,37
	Urusan Pilihan															
6	NTUP Tanaman Pangan		√	√	101,5	101,6	101,7	101,8	96,33	88,99	92,34	94,86	94,91	87,59	90,80	93,18
7	NTUP Hortikultura		√	√	103,5	103,6	103,7	103,8	104,09	98	99,32	104,26	100,57	94,59	95,78	100,44
8	Jumlah Produksi padi (ton GKG)		√		255.630,00	313.213,00	373.404,00	436.203,00	217.458,90	213.557,00	205.973,00	222.056,00	85,07	68,18	55,16	50,91
9	Jumlah Produksi jagung (ton PK)		√		36.934,00	38.049,00	39.199,00	40.382,00	22.987,30	9.845,00	8.984,60	9.369,14	62,24	25,87	22,92	23,20
10	Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian) (Ton)		√		17.154,00	19.257,00	21.477,00	23.814,00	30.114,00	30.039,00	22.659,72	25.663,16	175,55	155,99	105,51	107,77
11	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) (Ton)		√		17.796,00	19.236,00	20.775,00	22.419,00	20.791,00	20.534,00	13.213,54	15.332,35	116,83	106,75	63,60	68,39

*NSPK = Noma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
*IKK = Indikator Kinerja Kunci
Catatan : Data dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Dari Tabel. T-C.23, dapat diketahui bahwa terdapat 2 urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan dengan capaian terhadap masing masing indikator sebagai berikut :

1. Urusan Wajib

Untuk Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2024 capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, dengan skor 88,14. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, berimbang, bergizi dan aman sehingga pola pangan harapan (PPH) baik ketersediaan maupun konsumsi yang ideal dapat tercapai. Dengan pendekatan PPH ini, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*Affordability*). Adapun pola konsumsi masyarakat belum ideal dan masih terdapat ketimpangan seperti :

- Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.
- Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
- Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*).

Pola Pangan Harapan menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk Riau, karena semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan.

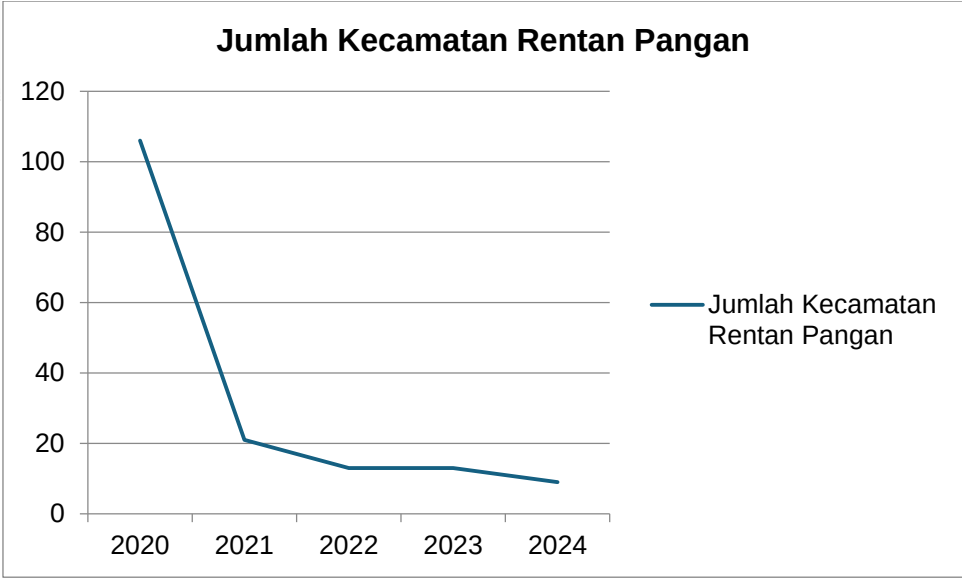
Untuk indikator wilayah rentan pangan, capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Jumlah Kecamatan Rentan pangan

No	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab Kuantan Singingi	10	1		1	1
2	Kab Indragiri Hulu	11		1	2	
3	Kab Indragiri Hilir	17	7	5	3	4
4	Kab Pelalawan	10	2			
5	Kab Siak	8				
6	Kab Kampar	14	5	2	1	1
7	Kab Rokan Hulu	8	1		2	2
8	Kab Bengkalis	6	2	3		
9	Kab Rokan Hilir	12	1	1	3	
10	Kab Kepulauan Meranti	8	1		1	1
11	Kota Pekanbaru		2			
12	Kota Dumai	2		1		
	JUMLAH	106	21	13	13	9

Sumber : FSVA BAPANAS Tahun 2020 – 2024

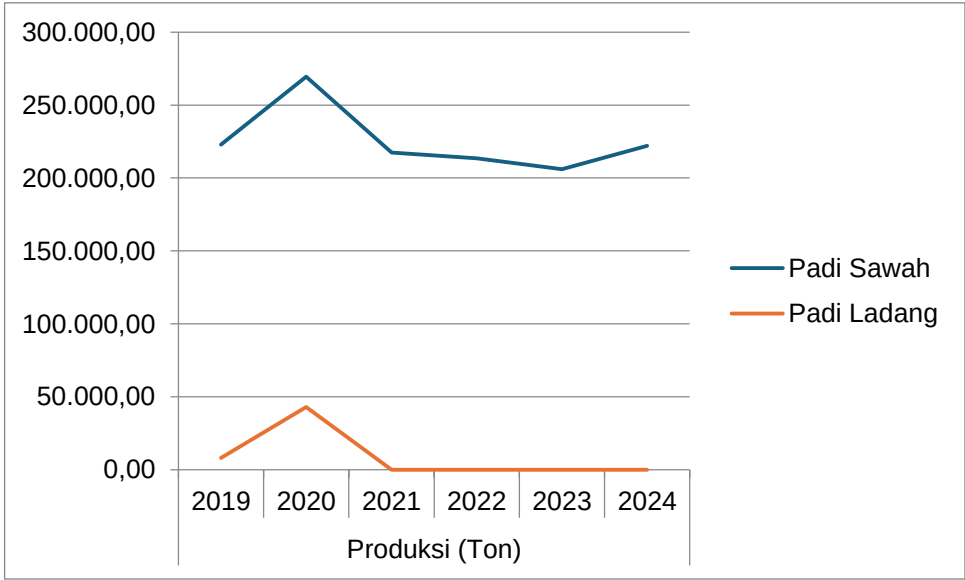
Berdasarkan tabel di atas jumlah kecamatan yang rentan pangan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 merupakan kondisi paling kritis dengan jumlah kecamatan sebanyak 106 kecamatan. Hal ini disebabkan pandemic COVID-19, gangguan distribusi, pembatasan mobilitas, serta penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, minimnya intervensi pada masa awal pandemi membatasi pemetaan wilayah rentan. Namun pada tahun 2021 jumlah kecamatan rentan pangan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 85 kecamatan. Hal ini ditopang oleh pemulihan system distribusi pangan, membaiknya akses logistik antar wilayah serta penyaluran bantuan sosial. Tahun 2023 jumlah kecamatan bertambah menjadi 172 kecamatan sementara jumlah kecamatan yang ditangani tetap. Meskipun jumlah kecamatan bertambah jumlah kecamatan rentan pangan tetap menurun menjadi 9 kecamatan. Penurunan kecamatan rentan pangan dipengaruhi oleh upaya penanganan yang meliputi perbaikan ketersediaan pangan melalui distribusi pangan yang lebih merata dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan akses pangan dengan mengintervensi harga pangan, serta perbaikan pemanfaatan pangan melalui edukasi gizi seimbang.



Grafik 1. Jumlah Kecamatan Rentan Pangan 2020 – 2024

2. Urusan Pilihan

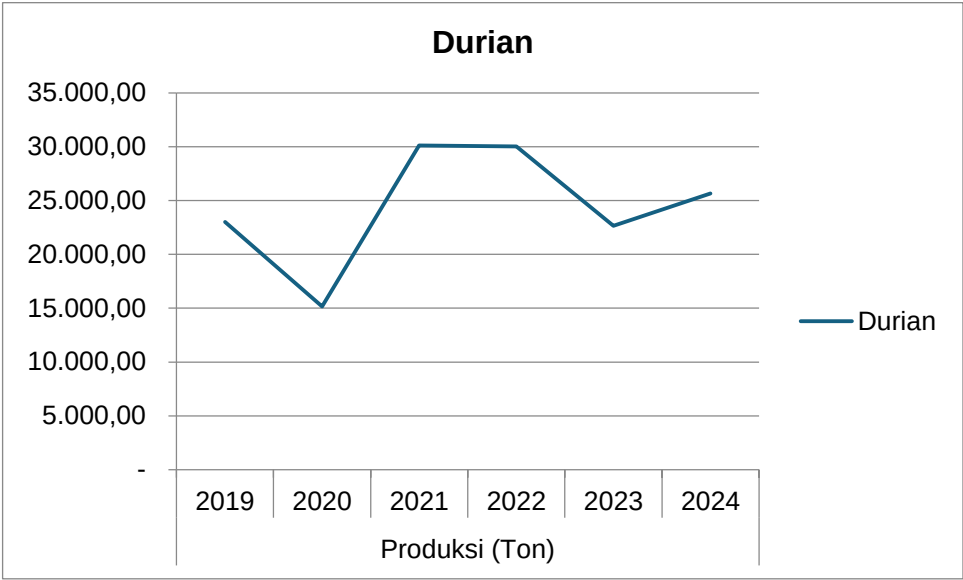
- Capaian untuk indikator tanaman pangan khususnya padi pada tahun 2024 adalah 222.056 Ton. Pencapaian tersebut meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Terjadipeningkatan produksi namun tidak signifikan. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan Indeks Pertanaman. Peningkatan produksi padi dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 2. Produksi Padi 2019 - 2024

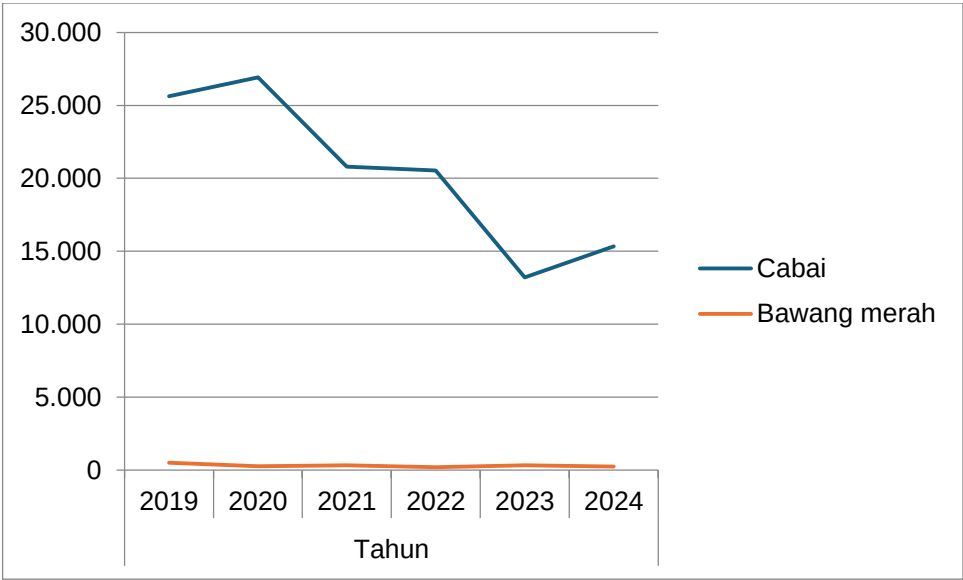
- Ketersediaan lahan sangat berpengaruh pada luas tanam, luas panen, produksi dan ketersediaan pangan. Kondisi luas tanam padi yang terus menurun dari tahun ketahun akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang ekstrim (kemarau panjang), memerlukan penanganan yang cukup serius untuk mengatasinya.

- Untuk target untuk tanaman hortikultura belum di tentukan per komoditi yang menjadi sasaran (unggulan daerah). Komoditi hortikultura khususnya buah durian sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, produksinya kembali menurun namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 25.663,16 Ton.



Grafik 3. Produksi Durian 2021 - 2024

- Ada beberapa komoditi hortikultura (sayuran) yang terkait erat dengan inflasi seperti cabai dan bawang merah. Capaian produksi cabai cenderung menurun dari tahun 2019 hingga 2023 namun pada tahun 2024 mulai mengalami kenaikan. Sementara capaian produksi bawang merah cenderung tetap (tidak mengalami peningkatan). Mengingat kedua komoditi ini penting untuk menjaga stabilitas inflasi, maka Pemerintah Provinsi Riau perlu mengembangkan kedua komoditi tersebut. Peningkatan produksi cabai dan bawang merah dapat dilihat pada grafik 3.



Grafik 4. Produksi Cabai dan Bawang Merah 2019 – 2024

Tabel 2.8.
Perkembangan Luas Panen Sayur-sayuran di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

Komoditas	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (ha)						
1. Cabe	3.415,00	3.375,00	2.874,00	2.815,00	2.317,24	2.376,38
2. Bawang Merah	92,00	63,00	67,00	34,00	73,76	44,00
2. Ketimun	1.511,00	1.597,00	1.368,00	1.317,00	1.270,83	1.154,19
3. Terong	1.138,00	1.202,00	1.048,00	878,00	855,19	830,89
4. Kacang Panjang	1.898,00	2.005,00	1.685,00	1.515,00	1.387,00	1.287,30
5. Bayam	2.077,00	2.195,00	2.367,00	2.615,00	2.630,33	2.548,46
6. Kangkung	2.170,00	2.293,00	2.492,00	2.699,00	2.801,24	2.687,26
7. Petsai dan Sawi	472,00	499,00	514,00	640,00	688,69	745,12
8. Labu	21,00	22,00	27,00	31,00	28,60	20,50
9. Sayuran Lainnya	1.218,18	18.317,19	30.938,16	712,31	26.280,01	3.505,68
Produksi (ton)						
1. Cabe	25.633	26.915	20.791	20.534	13.213,54	15.332,35
2. Bawang merah	506,7	263	329	195	322,74	245,52
2. Ketimun	16.461,70	17.284,79	16.808	15.547	14.149,16	11.191,90
3. Terong	10.224,60	10.735,83	10.168	9.195	7.367,90	6.974,02
4. Kacang Panjang	9.210,50	9.671,03	9.163	8.962	8.213,39	9.038,97
5. Bayam	8.554,10	8.981,81	8.378	10.586	10.094,03	9.301,27
6. Kangkung	9.924,10	10.420,31	10.646	12.498	13.463,63	12.178,13
7. Petsai dan Sawi	1.339,20	1.406,16	1.673	2.249	3.061,69	3.370,77
8. Labu	157	22,05	577	426	100,15	112,05
9. Sayuran Lainnya	15.419	22.160,91	12.598,80	2.796,33	7.857,22	23.920,95
Produktivitas (ton/ha)						
1. Cabe	7,51	7,97	7,23	7,29	5,70	6,45
2. Bawang Merah	5,51	4,17	4,91	5,71	4,38	5,58
2. Ketimun	10,89	10,83	12,28	11,80	11,13	9,70
3. Terong	8,98	8,93	9,70	10,47	8,62	8,39
4. Kacang Panjang	4,85	4,82	5,43	5,91	5,92	7,02
5. Bayam	4,12	4,09	3,53	4,04	3,84	3,65
6. Kangkung	4,57	4,54	4,27	4,63	4,81	4,53
7. Petsai dan Sawi	2,84	2,82	3,25	3,51	4,45	4,52
8. Labu	7,48	0,99	21,37	13,74	3,50	5,47
9. Sayuran Lainnya	12,66	1,21	0,41	3,93	0,30	6,82



- Komoditi sayuran dengan produksi yang mengalami pertumbuhan positif adalah bawang merah, bayam, kangkung, petsai dan sawi, dan labu, namun demikian produksi sayuran Provinsi Riau belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Potensi tanaman buah-buahan cukup tinggi dengan dukungan kondisi lahan. Komoditas manggis Tembilahan sudah dikukuhkan oleh Kementrian Pertanian menjadi Manggis Ratu Tembilahan. Selain itu juga durian Omeh Kampar, Jeruk Kuok dan Rokan Hulu, Nenas Kampar, Siak dan Dumai serta Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir (sesuai jenis dan varietas daerahnya). Perkembangan jumlah tanaman menghasilkan dan produksi buah-buahan (pohon/rumpun) di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.

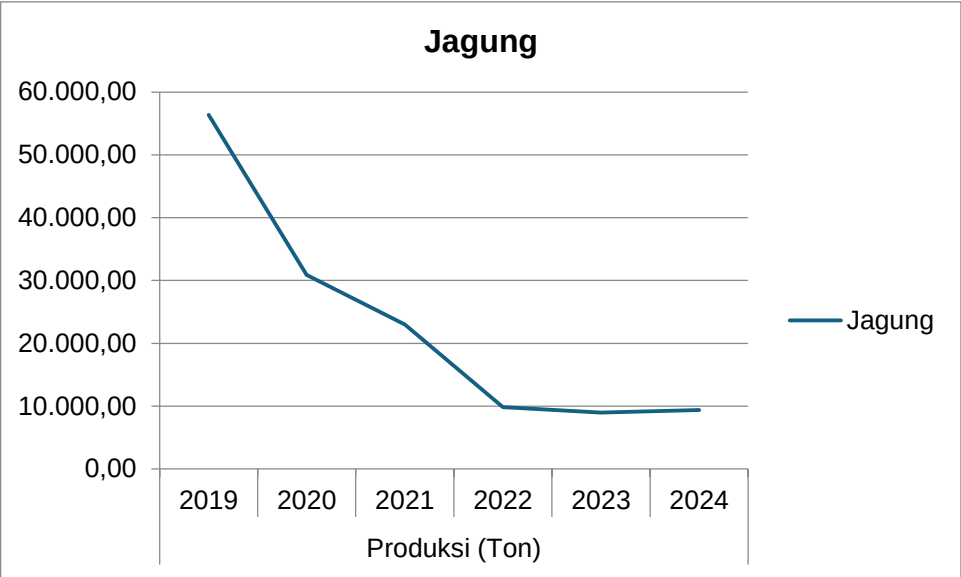
Perkembangan Luas Panen Buah-buahan di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

Komoditas	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (Pohon/Rumpun)						
1. Pisang	736.742	659.576	958.586	1.013.116	1.007.416	693.480
2. Durian	179.455	98.901	202.807	157.384	216.367	185.379
3. Duku	77.939	68.446	82.174	33.543	73.051	70.661
4. Mangga	132.081	119.768	176.108	123.501	140.718	120.843
5. Jeruk	392.134	435.957	560.919	410.929	389.351	252.499
6. Rambutan	275.590	176.311	292.550	217.345	222.257	230.146
7. Pepaya	182.967	191.978	262.778	210.486	192.750	186.898
8. Nenas	47.102.778	53.158.424	52.801.596	57.339.473	62.087.281	87.274.828
9. Jambu	131.730	156.762	173.289	183.729	189.355	178.857
10. Buah Lainnya	528.305	410.450	551.375	497.175	551.932	606.171
Jumlah	49.739.721	55.476.573	56.062.182	60.186.681	65.070.478	89.799.762
Produksi (ton)						
1. Pisang	43.436,00	37.457,00	48.901,00	55.207,00	27.766,32	44.935,20
2. Durian	23.010,00	15.168,00	30.114,00	30.039,00	22.659,72	25.663,16
3. Duku	7.055,00	10.303,00	7.595,00	3.970,00	3.475,43	7.945,07
4. Mangga	17.908,00	18.946,00	19.737,00	15.241,00	14.092,61	12.400,17
5. Jeruk	5.341,00	151.626,00	60.352,00	49.727,00	22.707,91	23.186,24
6. Rambutan	28.910,00	21.973,00	40.510,00	26.866,00	17.013,53	18.131,99
7. Pepaya	13.604,00	21.016,00	22.470,00	24.403,00	18.546,80	14.386,22
8. Nenas	132.583,00	214.277,00	354.878,00	261.769,00	379.024,96	355.181,98
9. Jambu	10.613,00	21.774,00	19.274,00	20.862,00	15.285,51	16.252,19
10. Buah Lainnya	50.980,00	68.811,00	68.698,00	68.668,00	41.201,41	52.855,37
Jumlah	333.440,00	581.351,00	672.529,00	556.752,00	561.774,20	570.937,58

- Untuk komoditi tanaman pangan lainnya seperti jagung,ubi, talas, sorgum dan Porang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di berbagai daerah khususnya di Provinsi



Riau sebagai sumber karbohidrat yang penting dalam diet manusia di banyak daerah. Pada tahun 2024 jumlah produksi jagung 9.369,14 Ton cukup rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 17.218 Ton. Peningkatan produksi jagung dapat dilihat pada grafik 4.



Grafik 5. Produksi Jagung 2019 – 2024

- Ubi, talas, dan sorgum memiliki sifat yang relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang subur dan kekeringan. Ini membuat mereka menjadi pilihan yang baik untuk ditanam di daerah dengan kondisi tanah dan iklim yang tidak ideal, seperti Provinsi Riau. Ketersediaan lokal tanaman-tanaman ini membuatnya lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Karena kebutuhan air dan input lainnya untuk menanam ubi, talas, dan sorgum umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya seperti padi atau jagung. Luas lahan eksisting komoditas talas ungu di kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir seluas 500 ha, jumlah produksi talas ungu pada tahun 2021 sebesar 6.493 ton, dengan volume ekspor (terutama ke Malaysia) sepanjang tahun 2021 senilai Rp. 26.669.430.000,00. Memperhatikan tingginya permintaan talas ungu dari negeri jiran maka pemenuhannya dapat dilakukan melalui pengembangan budi budidaya talas ungu secara intensif hingga seluas 1.500 ha. Luasan tersebut berada pada 4 desa yaitu desa Sinaboi, Darusalam, Sungai bakau, Raja Bejamu. Pemerintah Daerah telah mengkonfirmasi kepada masyarakat akan kesediaan penggunaan lahan milik masyarakat untuk ditanami talas ungu.
- Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.10.

Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

Komoditas	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (ha)						
1. Padi Sawah	60.738,60	71.632,36	53.062,40	51.054,00	52.913,00	56.422,00
2. Padi Ladang	2.403,40	12.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jagung	15.967,30	9.591,40	6.530,00	2.797,00	2.330,68	2.713,06
4. Ubi Kayu	4.314,70	3.741,90	3.427,60	2.320,00	2.270,84	2.019,64
5. Kacang Tanah	544,70	502,90	585,40	456,00	405,38	361,60
6. Ubi Jalar	430,70	354,00	363,10	323,00	295,99	273,47
7. Kacang Kedelai	582,40	1.823,00	666,10	296,00	448,06	180,55
8. Kacang Hijau	221,90	159,10	151,00	60,00	80,37	80,45
Produksi (Ton)						
1. Padi Sawah	222.832,00	269.344,00	217.458,90	213.557,00	205.973,00	222.056,00
2. Padi Ladang	8.042,00	43.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jagung	56.372,00	30.884,00	22.987,30	9.845,00	8.984,60	9.369,14
4. Ubi Kayu	125.633,00	108.953,00	108.474,00	73.424,70	58.469,54	54.376,08
5. Kacang Tanah	520,70	480,77	649,70	504,70	587,09	490,10
6. Ubi Jalar	5.620,60	4.602,00	7.168,80	6.373,20	6.434,22	5.890,51
7. Kacang Kedelai	584,00	1.827,00	390,00	325,00	634,93	267,38
8. Kacang Hijau	155,50	111,37	104,00	50,00	83,42	83,59
Produktivitas (Kw/Ha)						
1. Padi Sawah	36,69	37,60	40,98	41,83	38,93	39,36
2. Padi Ladang	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jagung	35,30	32,20	3,17	3,76	38,55	34,53
4. Ubi Kayu	291,17	291,17	30,05	31,61	257,48	269,24
5. Kacang Tanah	9,56	9,56	1,00	1,14	14,48	13,55
6. Ubi Jalar	130,50	130,00	13,92	19,79	217,38	215,40
7. Kacang Kedelai	10,02	10,02	0,84	1,09	14,17	14,81
8. Kacang Hijau	7,00	7,00	0,73	0,83	10,38	10,39

2.1.3.2 Capaian Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memperoleh anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta realisasinya tahun 2020-2023 baik sumber dana APBD maupun APBN seperti tercantum dalam Tabel 2.11 dibawah ini. Pada Tahun 2024, berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi.



Tabel 2.11.
(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Sumber APBD dan APBN

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA DAERAH	65.381.474.705,00	87.877.285.776,00	116.783.316.419,00	123.292.723.657,00	121.694.175.091,00	54.937.925.839,50	83.536.884.264,39	108.969.685.724,95	118.133.791.058,00	104.420.733.802,73	84,03	95,06	93,31	95,82	85,81
BELANJA OPERASI					113.953.845.701,00					97.474.191.211,61					85,54
BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.558.369.845,00	43.272.166.344,00	46.207.019.825,00	47.345.087.726,00		41.550.384.373,00	42.652.127.910,00	44.824.366.659,00	46.533.162.850,00		83,84	98,57	97,01	98,29	
BELANJA LANGSUNG	15.823.104.860,00	44.605.119.432,00	70.576.296.594,00	75.947.635.931,00		13.387.541.466,50	40.884.756.354,39	64.145.319.066	71.600.628.208,00		84,61	91,66	90,89	94,28	
BELANJA PEGAWAI	49.558.369.845,00	43.272.166.344,00	46.207.019.825,00	47.345.087.726,00		41.550.384.373,00	42.652.127.910,00	44.824.366.659,00	46.533.162.850,00		83,84	98,57	97,01	98,29	
BELANJA BARANG DAN JASA	13.909.905.860,00	41.204.838.458,00	70.064.688.733,00	62.007.452.614,00		12.879.516.466,50	37.731.527.739,39	63.638.083.975,95	53.207.073.441,00		92,59	91,57	90,83	93,87	
BELANJA MODAL	1.913.199.000,00	3.400.280.974,00	511.607.861,00	13.940.183.317,00	7.740.329.390,00	508.025.000,00	3.153.228.615,00	507.235.090,00	13.393.554.767,00	6.946.542.591,12	26,55	92,73	99,15	96,08	89,74
Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
DEKONSENTRASI	23.568.666.000	19.492.422.000	11.941.902.000	14.344.296.000	9.552.361.000	23.225.933.058	19.320.218.418	11.643.776.311	13.110.214.640	9.321.523.513	98,55	99,1	97,50	91,40	97,58
TUGAS PEMBANTUAN (TP)	68.357.286.000	40.622.856.000	35.261.677.000	13.649.046.000	40.345.895.000	61.044.846.626	39.298.525.085	32.637.429.414	13.333.570.991	39.614.284.594	89,3	96,74	92,56	97,69	98,19

Berdasarkan tabel 2.11 dibawah dapat kita lihat terjadinya kecenderungan meningkatnya anggaran pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, namun kenaikan tersebut belum sesuai dengan pagu yang direncanakan pada Renstra 2019 – 2024 sehingga target sulit tercapai. Pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 rasio anggaran dan penyerapan anggaran cukup ideal dengan capaian diatas > 84%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan mengacu pada segmen populasi atau individu yang menjadi fokus atau target dari suatu layanan atau program tertentu. Identifikasi kelompok sasaran pelayanan sangat penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program atau layanan karena membantu dalam menyesuaikan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus dari kelompok tersebut.

Dinas pangan, tanaman pangan, dan hortikultura menyediakan berbagai macam pelayanan untuk mendukung pertanian, keamanan pangan, dan pengembangan agribisnis. Sasaran Layanan Dinas PTPH adalah sebagai berikut :

- 1. Masyarakat
- 2. Kelompok Tani
- 3. Kelompok Wanita tani,

Kelompok wanita tani menjadi salah satu sasaran pelayanan sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Adapun Kelompok Wanita Tani yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Jumlah Kelompok Wanita Tani

No.	Kabupaten / Kota	BPP	Kec	Desa/ Kelurahan	KWT	Pusluhdes	Jumlah Kelompok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kuantan Singingi	15	15	229	11	2	2.252
2	Indragiri Hulu	14	14	194	153	16	1.896
3	Indragiri Hilir	8	20	236	68	-	1.791
4	Pelalawan	12	12	118	70	4	2.007
5	Siak	14	14	131	162	10	1.526
6	Kampar	21	21	253	121	129	3.057
7	Rokan Hulu	11	16	153	3	-	2.356
8	Bengkalis	11	11	155	69	2	1.709
9	Rokan Hilir	5	18	197	31		2.432
10	Kepulauan Meranti	9	9	101	20		1.645
11	Pekanbaru	3	17	84	92	1	408
12	Dumai	6	7	33	27	14	542
13	Dinas PTPH Riau	-	-	-			
14	BPTP Riau	-	-	-			
JUMLAH		129	174	1.884	827	178	21.621

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan, Dinas PTPH

Jenis pelayanan yang mendukung pertanian, keamanan pangan dan pengembangan agribisnis berupa penyediaan sarana prasarana pertanian, sertifikasi pangan segar dan pembinaan maupun pelatihan SDM pertanian.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, mitra Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian membentuk Brigade Pangan yang bertugas membantu petani usia muda untuk berperan dalam optimasi lahan dan cetak sawah. Brigade Pangan terdiri dari masyarakat, Lembaga masyarakat, polisi dan TNI. Kementerian Pertanian menargetkan 20 ribu petani usia muda dimana per 15 orang akan diawasi oleh 1 Brigade Pangan. Target lahan yang digarap adalah 200rb Ha. Pada Dinas PTPH, Brigade Pangan sudah dibentuk dan pelatihan dilakukan di UPT Pelatihan dan Penyuluhan.

Untuk konstruksi Optimasi Lahan di Provinsi Riau target sesuai SID adalah 19.390,79 Ha dengan realisasi 19..238,56 Ha (99,21 %) tersisa luas 152,23 Ha masih dalam proses penyelesaian (Kab. Siak). Sementara kegiatan konstruksi Cetak Sawah di Provinsi Riau target seluas 1.750 Ha dengan realisasi mencapai 23,67%. Seluruh kegiatan ini didukung dengan penyediaan alat mesin pertanian yang diperuntukkan bagi masing-masing brigade pangan.

Dalam perbenihan, Dinas PTPH juga bekerjasama dengan BSIP dan BRIN melalui UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih dalam menemukan varietas benih unggul.

Berikut daftar mitra Kerjasama pelayanan Dinas PTPH :

Tabel 2.13. Mitra Pelayanan Dinas PTPH

No	Nama OPD Mitra	Kegiatan	Volume		Dukungan Pendanaan
1.	Kementerian Pertanian, Polda, TNI	Pembentukan Brigade Pangan	1.200	Anggota	APBN dan APBD
		Cetak Sawah	1.750	Ha	APBN dan APBD
		Optimasi Lahan	19.390,79	Ha	APBN dan APBD
2.	Kementerian Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Riau	Dukungan Alat Mesin Pertanian Brigade Pangan	965	Unit	APBN dan APBD
3.	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Pelepasan varietas benih	1	Kegiatan	APBN dan APBD
4.	Badan Riset Inovasi Nasional	Budidaya Varietas Benih	1	Kegiatan	APBN dan APBD
5.	Badan Pangan Nasional	Implementasi Program Nasional Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1	Kegiatan	APBN dan APBD
6	Universitas (UNRI, UNILAK, UGM, IPB)	Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian	1	Kegiatan	APBD

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yakni :

- 1) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan,
- 2) Rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar,
- 3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah,
- 4) Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura,
- 5) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan dan terjadinya penurunan luas lahan,
- 6) Kondisi dukungan infrastruktur lahan pertanian belum memadai,
- 7) Semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja dan kurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian,
- 8) Belum termanfaatkannya secara optimal potensi dan sumber daya desa untuk sektor pertanian,
- 9) Masih belum berkembangnya unit layanan pada perangkat daerah sebagai Badan Layanan Usaha yang profesional.

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :

1.4.1.1 Aspek Teknis

1) Luas Tanam dan Luas Panen yang semakin menurun

Dalam 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan luas tanam dan luas panen komoditas Tanaman Pangan terutama padi setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 luas tanam padi di Provinsi Riau seluas 63.624,70 ha, sedangkan tahun 2024 menjadi 50.686.98 ha atau turun seluas 12.937,72 atau 20,33%. Pada tahun 2024 produksi padi mengalami kenaikan sebesar 16.083 ton dari tahun sebelumnya menjadi 222.056 ton. Untuk luas panen komoditas padi pada Tahun 2020 seluas 71.632,36 ha turun menjadi 56.422 ha pada tahun 2024 atau turun sebesar 15.210,36 ha atau 21,23 %.

2) Masih rendahnya produktivitas tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan produktivitas beberapa komoditas pertanian dari tahun 2020–2024 cukup baik. Komoditas padi misalnya, pada Tahun 2020 produktivitas 37,60 ku/ha dan Tahun 2024 mencapai 39,36 ku/ha atau meningkat sebesar 1,76 ku/ha atau 4,68 %. Namun ini masih jauh di bawah produktivitas padi nasional yang saat ini sudah mencapai 50,14 ku/ha.

Sementara untuk komoditi Jagung pada tahun 2020 produktivitas mencapai 32,20 ku/ha dan tahun 2024 mencapai 34,53 ku/ha atau meningkat sebesar 7,23 %.

Untuk Tanaman Hortikultura komoditi Cabe pada tahun 2020 produktivitas mencapai 7,97 Ton/Ha dan tahun 2024 baru mencapai 15.332,35 Ton atau 6,45 Ton/ha.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan penerapan teknologi budidaya yang baik, Sumber daya manusia (SDM) Petani, serta pendampingan yang maksimal dari petugas lapang.

3) Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai

Jumlah sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai, karena belum mampu memenuhi kebutuhan usaha tani sesuai dengan lahan yang tersedia seperti alat dan mesin pertanian maupun jaringan irigasi. Adapun kondisi alat pengolahan tanah (traktor roda 2) pada tahun 2023 terdapat sebanyak 239 unit dan alat pengolahan tanah (traktor roda 4) pada tahun 2023 sebanyak 27 unit, kondisi yang sama juga terjadi pada alsintan lainnya, seperti power thresher dan sebagainya. Sedangkan kondisi jaringan irigasi juga masih jauh dari yang diharapkan (banyak saluran yang rusak berat dan sedang), dari luasan lahan baku sawah 62.689 Ha, seluas 36.650,1 Ha baru dapat ditanami 1 kali (IP 100) dengan asumsi tidak tersedianya air sepanjang tahun.

Selain itu belum memadainya juga sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4) Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penerapan teknologi budidaya pertanian seperti sapta usaha tani, dan teknologi pasca panen yang masih rendah. secara keseluruhan penerapan teknologi baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama penyakit, pemupukan serta penanganan pasca panen yang belum sesuai dengan teknologi anjuran.

Pada tahun 2023 Kehilangan hasil pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura cukup tinggi dikarenakan anomali



iklim yang mengakibatkan terjadinya banjir seluas 6.759,12 Ha, bencana kekeringan seluas 1.273,19 Ha dan gangguan serangan hama Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang terjadi saat panen dan pasca panen juga cukup tinggi tercatat seluas 7.492,92 Ha. Potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT ini cukup besar, bahkan dapat menyebabkan puso. Begitu juga dengan susut hasil akibat panen dan pasca panen.

5) Industri Hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas

Besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri belum mampu dimanfaatkan secara optimal, karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan. Kondisi Industri hilir dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas pertanian menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas.

1.4.1.2 Aspek Sumberdaya Manusia

1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu keharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.



Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum mengacu kepada aspek “the right man in the right place” terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

2) Kapasitas SDM petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian, sehingga dengan demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Kondisi saat ini petani tanaman pangan dan hortikultura secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, dengan pendidikan formal yang rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan ketimbang petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ke depan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian harus lebih ditingkatkan baik pengetahuan maupun keterampilannya.

1.4.1.3 Aspek Geografi dan Demografi

1) Aspek geografi (*Landscape/ruang*)

Ketinggian tempat kabupaten/kota se Provinsi Riau berkisar antara 2 – 91 mdpl, dapat ditanami komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) Provinsi Riau, namun sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari provinsi lain. Pengembangan komoditas tersebut masih sangat tergantung dengan penyediaan air melalui curah hujan.

2) Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (el-Nino dan La-nina), sirkulasi angin, kenaikan permukaan air laut, merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai.

3) Alih fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non tanaman pangan (perkebunan dan perikanan) dan bahkan ke non pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll) setiap tahun semakin meningkat. Di Provinsi Riau dalam 4 (empat) tahun terakhir tahun 2020 s/d 2024,



tercatat luas lahan sawah Provinsi Riau berkurang dari 62.689 ha menjadi 59.181 Ha. Ke depan perlu adanya suatu kebijakan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, agar tidak terjadi kerawanan pangan di Provinsi Riau, sehingga mengurangi ketergantungan suplai pangan dari daerah lain.

4) Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau cukup tinggi, dimana hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Riau sejumlah 6.394,1 ribu jiwa dan sensus Tahun 2024 berjumlah 6.728,1 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,37 % per tahun. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Provinsi Riau. Prediksi kebutuhan beras hingga tahun 2030 adalah 7,29 juta. Sementara kondisi eksisting produksi dan konsumsi beras dan cabai belum memenuhi kebutuhan.

5) Sebagian besar daerah sentra produksi pertanian rawan banjir dan kekeringan

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal persawahan di beberapa kabupaten tersebar mengikuti aliran sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, hanya sebagian kecil yang tidak berada di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini menjadikan sebagian besar areal persawahan di Provinsi Riau sebagai daerah yang rawan banjir. Selain kondisi tersebut diatas terdapat juga areal persawahan tadah hujan dimana pada musim kemarau, terjadi kekeringan sedangkan air irigasi tidak mampu mensuplai kebutuhan air pada tanaman. Untuk kedepan perlu adanya terobosan untuk penyelesaian permasalahan ini, antara lain dengan pengembangan sistem pompanisasi dan perbaikan irigasi serta pembangunan embung sebagai cadangan air.

2.2.2. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis disusun dengan menyimpulkan permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu globa, nasional dan regional), potensi daerah yang menjadi kewenangan. Potensi daerah yang menjadi kewenangan yaitu ketahanan pangan daerah dan peningkatan produksi pertanian mendukung kesejahteraan petani. Teknik menyimpulkan isu strategis dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.14. (Tabel 2.1 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Ketahanan pangan daerah	Masih belum terwujudnya kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah	Kecenderungan terjadi penurunan Jasa Lingkungan penyedia pangan menjadi lebih baik kondisinya. Laju penurunan luasan Jasa Lingkungan penyedia pangan kondisi buruk (klasifikasi sangat rendah – rendah) menjadi kondisi lebih baik (Sedang dan Baik) sekitar 48.299 ha/ tahun selama kurun waktu 10 tahun	Pertumbuhan populasi dunia yang pesat menuntut peningkatan produksi pangan yang signifikan.	Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah	Berdasarkan tingkat ketahanan pangan kabupaten/kota di Riau, terdapat tiga daerah dengan kategori sangat tahan, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Siak. Sementara itu, beberapa daerah masih berada dalam kategori agak rentan, yaitu Kabupaten Rokan Hulu (58,88), Kabupaten Kampar (59,69), dan Kabupaten Indragiri Hulu (59,35). Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga ketersediaan dan meningkatkan produksi lokal pangan	Peningkatan ketersediaan pangan
		hanya sekitar 5% yang memiliki Jasa lingkungan hidup penyediaan pangan yang masih baik (status tinggi – sangat tinggi).				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		Sedangkan pada indeks status sedang berada pada angka 17% saja, selebihnya sebesar 65% dalam kondisi buruk (status indeks rendah – sangat rendah)				
Peningkatan produksi pertanian mendukung kesejahteraan petani	Produksi pangan strategis yang masih rendah sehingga menyebabkan tingginya tingkat Ketergantungan Pangan terhadap Daerah Lain.	Produksi pangan atau praktik pertanian yang sedang berlangsung masih berada di bawah batas kapasitas yang dapat ditopang oleh lingkungan atau sistem pertanian, tanpa mengganggu keseimbangan ekologis atau menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan ini menunjukkan masih luas lahan yang berpotensi dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi Riau				
	Terjadi penurunan luas lahan pertanian dan belum maksimalnya sarana alsintan dan infrastruktur (irigasi, jalan usaha tani) penunjang dalam	pemanfaatan lahan yang telah terdegradasi sehingga produktivitas lahan dalam menghasilkan hasil panen menjadi marginal	Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir yang merusak tanaman dan mengganggu			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	peningkatan produksi tanaman pangan		produksi pangan.			
		Kondisi lahan gambut tidak bisa meningkatkan produktivitas komoditas pertanian lebih dari 4 ton/ha, kecuali tanaman yang adaptif terhadap gambut;				Pengembangan teknologi (Teknologi pengaturan ketinggian muka air yang baik sangat potensial untuk pengembangan komoditas pertanian di lahan gambut)
		Luas daerah daratan rendah/rawa yang potensi untuk prasarana pengairan Provinsi Riau adalah seluas 426.325 Ha. Sedangkan luas lahan rawa yang masih tersedia (reklamasi) yang masih dapat dikembangkan adalah seluas 289.836 Ha				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Ketersediaan air belum maksimal	Jasa lingkungan hidup penyediaan air di Provinsi Riau terindikasi bahwa < 1% atau 59.565,81 ha yang memiliki JLH penyediaan air yang telah baik (status tinggi – sangat tinggi). Sedangkan jasa penyediaan air dengan status sedang berada pada angka 8% atau 813.011,82 hektar saja, serta selebihnya seluas kurang lebih 8.178.601,38 ha (80%) dalam kondisi buruk (status rendah – sangat rendah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah di Provinsi Riau dalam menyediakan air, khususnya bagi Kawasan permukiman, Kawasan pertanian, dan Kawasan industri yang membutuhkan suplai air yang cukup besar bagi aktivitas di dalamnya.				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kondisi infrastruktur pertanian yang menjadi kewenangan pusat dan kab/kota belum memadai, seperti irigasi, trio tata air perkebunan, jalan usaha tani, dan lain-lain	Dari luas baku 10.035 Ha luas lahan yang fungsional baru 5.040 Ha. Indeks kinerja sistem irigasi masih buruk.				
		Dari luas baku 106.936 Ha luas lahan yang fungsional baru 8.637 Ha. Indeks kinerja sistem irigasi masih buruk.				
				Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming melalui penyediaan bibit, varietas unggul, instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang berstandar nasional/global, ramah lingkungan dan ekonomis		Teknologi pengaturan ketinggian muka air yang baik sangat potensial untuk pengembangan komoditas pertanian di lahan gambut;
						Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						Penguatan kelembagaan usaha petani dan pembiayaan koperasi petani
						Pengembangan kemitraan pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi pertanian
	Iklim dan bencana (kondisi lingkungan) mempengaruhi peningkatan produktivitas pertanian	Status Jasa Lingkungan Hidup pengaturan iklim di Provinsi Riau didominasi oleh kondisi buruk, yang mencakup sekitar 5.522.202,17 hektar atau sekitar 54% dari luas provinsi.				Perlindungan bencana pertanian
		kondisi kerawanan terhadap bencana di Provinsi Riau adalah 69% pada kondisi yang tinggi. Kondisi bencana yang rentan dan dominan terjadi Provinsi Riau adalah bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan.				

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki tujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani yang didasarkan pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Misi 2 yaitu meningkatkan ekonomi yang berdaya saing.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Ketahanan Pangan: Melalui kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan pangan pada provinsi tetangga, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat di Provinsi Riau.
- 2) Meningkatkan Produktivitas Pertanian: Melalui berbagai upaya seperti penerapan teknologi pertanian modern, pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan sumber daya yang memadai bagi petani, dan lain-lain, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan.

Tujuan, Sasaran dan target kinerja Dinas PTPH dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1. (Tabel.3.3 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA											
- Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	70,42	71,93	73,46	75,04	76,64	78,28	79,95	
			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)	95,84	96,05	96,32	97,12	98,26	99,26	100,02	
			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura (Poin)	103,83	105,78	107,24	109,15	111,25	113,87	115,34	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan (Indeks)	37,73	39,24	40,77	42,35	43,95	45,59	47,26	
		Meningkatnya Pendapatan Petani	NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)	94,86	97,07	97,56	98,01	98,78	99,02	100,01	
			NTUP Sub Sektor Hortikultura (Poin)	104,26	104,86	105,33	106,23	106,76	107,45	107,89	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	72,15	72,85	73,42	74,02	74,05	74,09	74,12	

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Pemerintah Pusat memberikan arahan dan pedoman umum tentang NSPK untuk sektor-sektor tertentu, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan NSPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa NSPK yang ditetapkan mendukung peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan keamanan sektorPangan, dan Pertanian secara menyeluruh. Berikut ini adalah tabel Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat disesuaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sesuai dengan arahan dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Tabel 3.2.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
1	Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan di pasar	≥ 95%	- Memantau stok pangan di pasar dan gudang penyimpanan. - Mengkoordinasikan dengan distributor dan pedagang untuk memastikan pasokan pangan yang memadai. - Melakukan pemantauan rutin terhadap harga pangan dan mengambil tindakan jika terjadi kenaikan yang signifikan.	Persentase ketersediaan pangan di pasar ≥ 95%
2	Ketersediaan Cadangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok di gudang atau tempat penyimpanan tertentu	≥ 90%	Melakukan pemantauan rutin terhadap stok cadangan	Persentase ketersediaan ≥ 90%
3	Penanganan Darurat	Prosedur penanganan darurat dalam penggunaan cadangan pangan pokok saat terjadi kekurangan	Sesuai SOP	Menetapkan prosedur darurat dan tim penanganan	Penanganan darurat tepat waktu

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
4	Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan dari kontaminasi dan pencemaran	$\geq 90\%$	- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap tempat penyimpanan dan pengolahan pangan. - Memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang ditetapkan. - Mengawasi praktik sanitasi di pasar dan industri makanan.	Persentase keamanan pangan dari kontaminasi dan pencemaran $\geq 90\%$
5	Distribusi Pangan	Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan pangan dari produsen ke konsumen	≤ 24 jam	- Menetapkan jadwal distribusi pangan yang efisien dan terjadwal. - Memastikan kondisi kendaraan dan fasilitas penyimpanan selama distribusi. - Mengoordinasikan dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi.	Waktu distribusi pangan dari produsen ke konsumen ≤ 24 jam
6	Penyuluhan Pangan	Jumlah kegiatan penyuluhan pangan yang diselenggarakan	≥ 50 kegiatan	- Merencanakan dan mengorganisir kegiatan penyuluhan tentang gizi seimbang, praktik sanitasi, dan cara memilih bahan makanan yang aman. - Melibatkan petugas penyuluhan pangan yang berkualitas. - Menyediakan materi penyuluhan yang informatif dan mudah dipahami.	Jumlah kegiatan penyuluhan pangan yang diselenggarakan ≥ 50 kegiatan
7	Ketersediaan Pangan Lokal	Persentase ketersediaan pangan lokal di pasaran	$\geq 70\%$	Melakukan pemantauan terhadap jumlah dan variasi pangan lokal yang tersedia di pasaran.	Persentase ketersediaan pangan lokal $\geq 70\%$
8	Diversifikasi Konsumsi Pangan	Persentase konsumsi pangan lokal dan bervariasi dalam pola makan sehari-hari	Sesuai panduan	Mengadakan kampanye dan penyuluhan mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan variasi dalam pola makan sehari-hari.	Persentase konsumsi pangan lokal dan variasi sesuai panduan.

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
9	Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri terhadap total konsumsi pangan	≥ 80%	Melakukan evaluasi terhadap ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri dan impor.	Persentase kemandirian pangan ≥ 80%
10	Pemberdayaan Petani Lokal	Jumlah petani lokal yang terlibat dalam produksi pangan lokal	Sesuai target	Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani lokal mengenai teknik bertani yang berkelanjutan dan pemasaran produk.	Jumlah petani lokal terlibat sesuai target
11	Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok		Regulasi Standar Kualitas	Pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan pokok, perencanaan pasokan, sistem distribusi yang efisien, dan pengawasan terhadap stok.	Ketersediaan dan Stabilitas Harga
12	Pengelolaan cadangan pangan pokok	Pemantauan Pasokan	Pedoman Resmi Kualitas, Keamanan, Dan Kuantitas	Manajemen Risiko, Penggunaan Cadangan, Pengadaan dan Pengisian Ulang	Sistem keamanan fisik, pengawasan keamanan, dan pelatihan Personil.
13	Penetapan harga pangan	Penetapan Harga Tertinggi Dan Terendah	Sesuai Regulasi Pemerintah	Survei Harga Rutin, Analisis Data, Dan Pemantauan Pasokan Dan Permintaan	Jumlah Intervensi Pemerintah, Biaya Produksi, Keadilan Sosial, Harga terjangkau untuk semua lapisan masyarakat .

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
14	Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.	Penetapan standar angka kecukupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat	Sesuai PedomanData Populasi	Melakukan analisis terhadap kebutuhan gizi masyarakat. Perencanaan Pangan, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.	Angka kecukupan gizi telah ditetapkan dengan jelas
15	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Kerawanan Pangan	$\leq 20 \%$	- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota Penanganan kerawanan pangan provinsi. - Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Persentase Kerawanan Pangan di Provinsi dan Kab/Kota $\leq 20 \%$
16	Penilaian Tingkat Risiko Kerawanan Pangan	Penilaian tingkat risiko kerawanan pangan berdasarkan skala dan dampaknya	Sesuai kriteria	Menetapkan kriteria penilaian tingkat risiko	Tingkat risiko terukur
17	Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan	$\geq 80\%$	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.	Persentase Keamanan Pangan $\geq 80\%$
18	Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian	Spesifikasi Teknis, Kualitas, Dan Keamanan	- Pengawasan peredaran sarana pertanian. - Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman Pengawasan mutu dan peredaran benih.	Keselamatan Efisiensi Energi
19	Ketersediaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian seperti irigasi, traktor, gudang penyimpanan, dan lain-lain	$\geq 90\%$	Melakukan survei terhadap sarana pertanian yang ada di wilayah tersebut	Persentase ketersediaan $\geq 90\%$

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
20	Kualitas Sarana Pertanian	Standar kualitas untuk setiap jenis sarana pertanian	Sesuai SNI	Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi dan keamanan sarana pertanian	Sarana pertanian memenuhi standar SNI
21	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Pertanian	Prosedur perawatan dan pemeliharaan untuk menjaga agar sarana pertanian selalu dalam kondisi yang baik	Sesuai SOP	Menjadwalkan jadwal perawatan dan pemeliharaan rutin untuk setiap jenis sarana pertanian	Sarana pertanian dijaga dengan baik
22	Evaluasi Kinerja Sarana Pertanian	Proses evaluasi kinerja sarana pertanian dalam mendukung produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian	Sesuai KPI	Melakukan pengukuran kinerja sarana pertanian secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas penggunaannya	Kinerja sarana pertanian terukur
23	Ketersediaan Irigasi	Persentase lahan pertanian yang dilayani oleh sistem irigasi terhadap total lahan pertanian	$\geq 80\%$	Melakukan survei untuk menentukan kebutuhan irigasi	Persentase ketersediaan irigasi $\geq 80\%$
24	Kondisi Jalan Pertanian	Persentase jalan pertanian yang dalam kondisi baik dan dapat dilalui kendaraan pertanian	$\geq 90\%$	Menjadwalkan inspeksi rutin terhadap jalan pertanian	Persentase kondisi jalan baik $\geq 90\%$
25	Kapasitas Gudang Penyimpanan	Persentase kapasitas gudang penyimpanan yang digunakan terhadap total kapasitas penyimpanan	$\geq 70\%$	Melakukan inventarisasi dan pemantauan stok gudang	Persentase kapasitas gudang terpakai $\geq 70\%$
26	Ketersediaan Sarana Transportasi	Persentase waktu atau jam di mana sarana transportasi tersedia untuk mengangkut hasil pertanian	$\geq 95\%$	Menyusun jadwal penggunaan sarana transportasi secara efisien	Persentase ketersediaan transportasi $\geq 95\%$

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
27	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Identifikasi Resiko Dan Potensi Bencana	Standar Keselamatan	Pengajuan Permohonan, Pemantauan dan Peringatan Dini, Penanggulangan	Pemulihan Pertanian Pasca-Bencana
28	Perizinan Usaha Pertanian	Proses identifikasi izin-izin yang diperlukan untuk usaha pertanian	Sesuai Regulasi Yang Mengatur Izin Usaha Pertanian	Evaluasi Dan Verifikasi Peninjauan Dan Pengawasan	Kelayakan Teknis, Finansial, lingkungan Dan Legal
29	Ketersediaan Benih Unggul	Persentase ketersediaan benih unggul di pasaran	$\geq 90\%$	- Mendata produsen benih unggul lokal. - Mengadakan penilaian kualitas benih secara berkala. - Menetapkan standar penyimpanan dan distribusi benih unggul	Persentase ketersediaan benih unggul di pasaran $\geq 90\%$
30	Waktu Tanggap Layanan	Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi permintaan layanan dari masyarakat atau petani	≤ 1 hari	- Menerima permintaan layanan dari masyarakat melalui saluran yang telah ditentukan. - Menugaskan petugas untuk menanggapi permintaan layanan sesuai prioritas. - Melakukan tindak lanjut secara berkala terhadap permintaan layanan	Permintaan layanan ditanggapi dalam waktu ≤ 1 hari
31	Kualitas Hasil Panen	Standar kualitas untuk hasil panen pangan	Sesuai SNTP/SNI	- Memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik dan benar. - Melakukan pemantauan terhadap kondisi pertumbuhan tanaman dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan. - Mengadakan pemeriksaan kualitas hasil panen sebelum dipasarkan	Hasil panen memenuhi standar kualitas sesuai SNTP/SNI
32	Penggunaan Pestisida	Tingkat penggunaan pestisida yang aman dan sesuai regulasi	Sesuai P-IRT	- Memberikan penyuluhan kepada petani tentang penggunaan pestisida yang aman dan efektif. - Memonitor penggunaan pestisida dan mengawasi penjualan pestisida secara terkontrol.	Penggunaan pestisida sesuai dengan regulasi dan tidak

No	Aspek	Deskripsi	Norma/Standar Pusat	Prosedur Daerah	Kriteria Penilaian
				- Mengadakan pemeriksaan dan uji sampel pestisida secara berkala	melebihi batas yang ditetapkan
33	Efisiensi Penggunaan Pupuk	Tingkat efisiensi dalam penggunaan pupuk pada lahan pertanian	$\geq 70\%$	- Memberikan penyuluhan kepada petani tentang dosis dan waktu aplikasi pupuk yang tepat. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan pupuk oleh petani. - Mendorong penggunaan pupuk organik dan teknik pengelolaan tanah yang berkelanjutan.	Efisiensi penggunaan pupuk $\geq 70\%$
34	Tingkat Kepuasan Pelanggan	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	$\geq 85\%$	- Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala menggunakan kuesioner terstruktur. - Menganalisis hasil survei dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. - Mengadakan pertemuan terbuka dengan pelanggan untuk mendengar masukan dan umpan balik	Persentase kepuasan pelanggan $\geq 85\%$
35	Efisiensi Penggunaan Air/Keberlanjutan Air	Tingkat efisiensi dalam penggunaan air untuk irigasi pertanian	$\geq 80\%$	- Menetapkan target penggunaan air yang efisien sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi lahan. - Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik irigasi yang hemat air. - Memantau penggunaan air dan mengevaluasi efisiensi secara berkala.	Efisiensi penggunaan air dalam irigasi $\geq 80\%$
36	Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan	≥ 100 kegiatan	- Membuat rencana penyuluhan pertanian berdasarkan kebutuhan dan potensi setiap wilayah. - Mengadakan pelatihan dan demonstrasi pertanian secara berkala. - Melibatkan petani dan kelompok tani dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan ≥ 100 kegiatan

Dalam tabel ini, aspek-aspek yang relevan telah diidentifikasi bersama dengan norma atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Prosedur yang diusulkan untuk menerapkan norma dan standar tersebut di tingkat daerah kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kriteria penilaian digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tabel ini memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menerapkan dan mengawasi NSPK dalam sektor pangan, tanaman pangan, dan hortikultura.

Sasaran RPJMD Riau 2025 – 2029 yang diacu oleh Renstra DPTPH Riau 2025 – 2029 yaitu meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani. Dari sasaran ini DPTPH menetapkan sasaran pendukung sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan
2. Meningkatnya pendapatan petani

Sasaran kedua yang diacu yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Dari sasaran ini DPTPH menetapkan sasaran pendukung sebagai berikut Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran-sasaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan dan kesejahteraan dalam sektor pertanian serta penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat Provinsi Riau.

3.3. Strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan melalui :**
 - a. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga;**

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan, meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam

upaya mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan, Kecukupan jumlah (kuantitas), Kecukupan gizi, Keamanan dan Kecukupan mutu.

b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; (keamanan)

Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dilakukan penanganan dalam bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan pangan dengan indikator keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan, keterjangkauan /kesesuaian social/budaya, kesesuaian terhadap preferensi, kesesuaian terhadap kebiasaan & budaya, kesesuaian terhadap agama.

c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan, ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga.;

Strategi pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

2. Pembangunan Pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta Peningkatan luas panen dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan.

Strategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas utama pertanian melalui peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan luas tanam polikultur.

3. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan.

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan produktifitas dengan peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan dan Penerapan Teknologi Sapta Usaha Tani (penggunaan bibit unggul, teknik pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, pasca panen dan pemasaran hasil panen) , serta peningkatan prasarana pertanian dengan alsintan (alat pengolahan lahan, alat pasca panen dan alat pengolahan hasil).

4. Melakukan upaya Perjanjian formal antara petani atau pemilik lahan dengan perusahaan atau investor untuk produksi pertanian.

Strategi kontrak *farming* harus dirancang dengan cermat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian harus mencakup semua detail terkait tanggung jawab, hak, kewajiban, dan pembagian risiko secara jelas dan transparan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor hukum, sosial,

ekonomi, dan lingkungan dalam merancang kontrak farming yang efektif dan berkelanjutan.

5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani dan kelompok wanita tani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

6. Mengoptimalkan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan cara :

- a. Mengoptimalkan penanggulangan bencana pertanian melibatkan berbagai langkah strategis dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat kapasitas dalam menghadapi bencana alam atau insiden yang dapat memengaruhi sektor pertanian. meliputi;
 - 1) Menganalisis dan memahami risiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut, termasuk banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, atau wabah penyakit tanaman;
 - 2) Membuat rencana darurat yang terperinci dan terstruktur untuk menghadapi berbagai skenario bencana yang mungkin terjadi;
 - 3) Melakukan pelatihan reguler bagi petani, petugas pertanian, dan staf terkait tentang penanggulangan bencana, termasuk praktik-praktik pengelolaan risiko, pertolongan pertama, dan pemulihan pasca-bencana;
- b. Meningkatkan manajemen sumber daya air dan irigasi untuk mengurangi risiko kekeringan atau banjir yang dapat mempengaruhi pertanian. Ini termasuk pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik, pembangunan sumur air pertanian, pengelolaan air yang efisien, dan diversifikasi sumber air.
- c. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dan sistem pertanian berbasis agroforestri atau polikultur untuk mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan ketahanan pangan, serta
- d. Membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam upaya penanggulangan bencana. Kolaborasi ini penting untuk memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi.

7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara

- a. Merencanakan kinerja, mengevaluasi dan menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai pertimbangan perencanaan kinerja berikutnya

- b. Mengumpulkan dan mengolah data-data sektor pangan dan pertanian lebih akurat untuk mendukung evaluasi kinerja.

Penahapan pelaksanaan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. (Tabel.3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencegah penurunan dan alih fungsi lahan pertanian TPH	Menambah luas areal tanam baru	Meningkatkan penggunaan teknologi Alsintan	Meningkatkan produktivitas TPH melalui penerapan inovasi dan teknologi pertanian yang terstandar	Optimalisasi tata niaga pertanian
Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Melakukan advokasi terhadap regulasi yang tidak pro petani	Membuka akses transportasi dan distribusi
Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Optimalisasi diversifikasi pangan	Optimalisasi pemanfaatan produk pangan yang B2SA
Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan	Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan	Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian	Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pertanian melalui perbaikan dan pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan infrastruktur lainnya yang mendukung pertanian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani	Meningkatkan kapasitas SDM petugas dan petani
			Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan	Menambah jumlah Petugas Lapang sesuai dengan kebutuhan Meningkatkan kapasitas dan orientasi kelembagaan

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundangundangan yang sudah ada.

Arah Kebijakan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat
- 2. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin

Sedangkan arah Kebijakan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.

Dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau, maka dirumuskan arah kebijakan menggunakan Teknik pada tabel 3.4

Tabel 3.4 (3.5 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Ketersediaan dan keamanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kemandirian pangan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
2	Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian	Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani miskin	Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan penerapan teknologi pertanian bagi petani, meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura secara akuntabel dan professional.	

Penjelasan rinci mengenai Arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan penguatan cadangan pangan, keterjangkauan pangan dan menurunkan daerah rentan pangan.
- b. Meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi
- c. Meningkatkan pemanfaatan pangan melalui peningkatan mutu pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan.
- d. Mewujudkan usaha tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumberdaya lahan secara optimal.
- e. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui penambahan / fasilitas sarana dan prasarana pertanian yang mencukupi dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2. Kebijakan Teknis :

Dalam rangka peningkatan produksi tanaman hortikultura khususnya pada beberapa komoditi unggulan Provinsi Riau dan juga komoditi tanaman sayuran yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari dan berpengaruh terhadap inflasi maka juga digagas Riau Bertuah atau Riau Bertanam Sayur dan Buah, adapun yang menjadi komoditi unggulan Riau Bertuah antara lain: durian, lengkeng, manggis, nenas, pisang dan jeruk, pemilihan komoditas tersebut mengingat komoditas tersebut telah menjadi unggulan lokal sesuai dengan kondisi lahan di Provinsi Riau, serta memiliki potensi pengembangan mengingat permintaan pasar yang terus berkembang. Sedangkan untuk tanaman terkait inflasi yaitu, cabai dan bawang merah.

Secara umum ada beberapa hal yang menjadi kebijakan teknis pengembagn pertanian dan ketahananpangan Provinsi Riau yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilisasi harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi bencana, kelangkaan pasokan atau gejolak harga didaerah-daerah rentan pangan serta pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog.
- b. Meningkatkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan pemantauan harga pangan pokok secara berkala yang meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga serta memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.
- c. Meningkatkan pemanfaatan pangan dengan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi, perekayasa atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun

kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat; memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri dan penyuluhan; bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta melaksanakan Uji Laboratorium terhadap sampel yang akan disertifikasi dan melakukan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar.

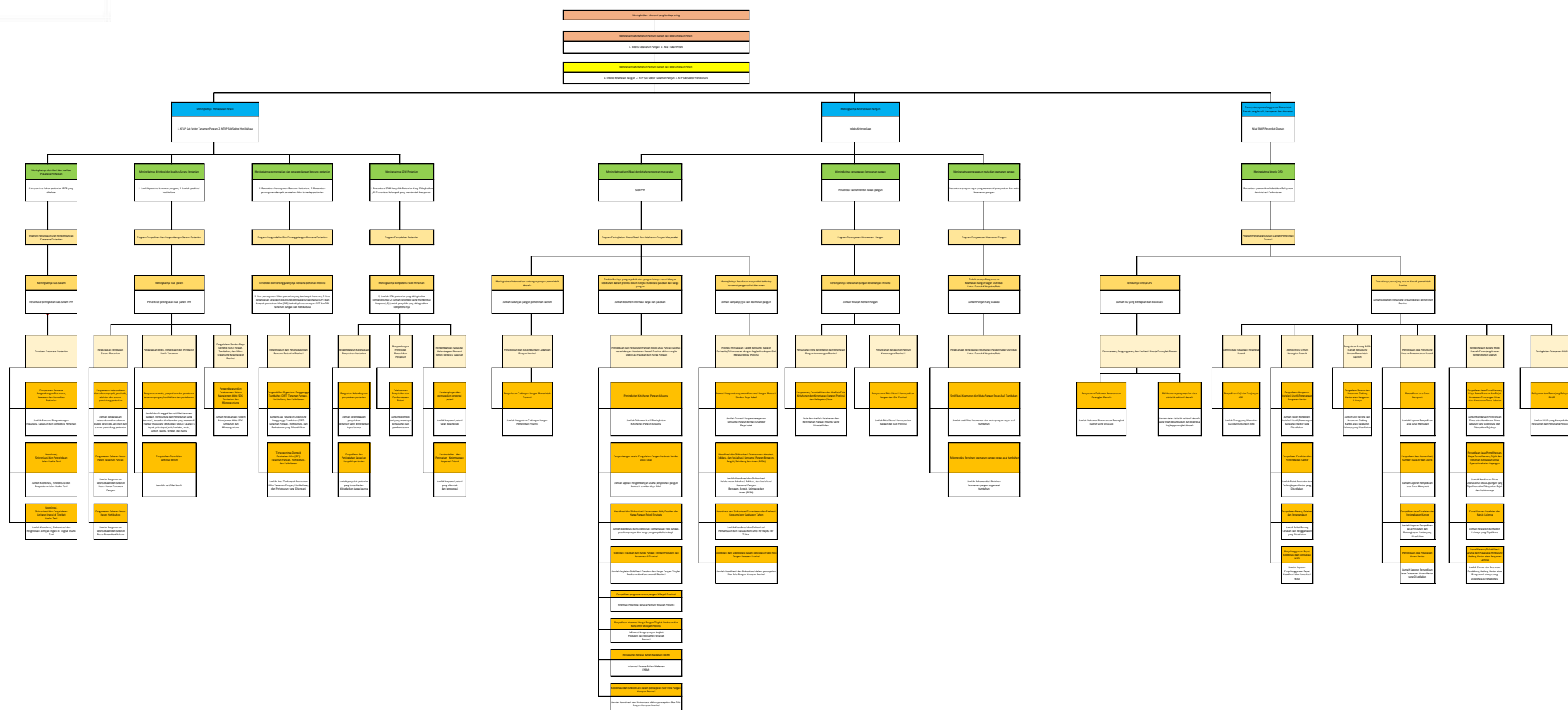
- d. Meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- e. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan dengan melaksanakan rehabilitasi sawah terlantar, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), optimasi lahan rawa, cetak sawah baru, optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan (ekstensifikasi, polikultur), dan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dengan penyediaan benih unggul bermutu, penanganan perlindungan tanaman, perbaikan jaringan irigasi (sekunder / tersier), pembinaan serta penyediaan sarana produksi (pupuk dan pestisida) pada sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- f. Meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveylance dan pengujian hama dan penyakit tanaman, pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan dan pengujian mutu benih, intensifikasi, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengembangan sumber air pertanian melalui Irigasi dan normalisasi saluran drainase (perpompaan), pembangunan embung sebagai cadangan air serta pembangunan dan rehabilitasi jalan pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.

- g. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
- Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan
 - Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)
- h. Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman pangan dan hortikultura dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya klaster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk tanaman pangan dan hortikultura, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar.
- i. Mendorong peran serta ibu rumah tangga dan anggota keluarga lainnya untuk ikut terlibat dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah atau lingkungan.
- j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura secara akuntabel dan professional.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja. Dalam menetapkan indikator kinerja maka disusun cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Berikut adalah *cascading* yang telah disusun oleh DPTPH Provinsi Riau

Gambar 3.1. Cascading Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau maka tujuan utama program pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penurunan wilayah rentan pangan dan penyediaan pangan serta peningkatan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dengan cara peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP).

Berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, program prioritas pada Dinas PTPH adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.755.373.475,00		2.917.661.543,00		3.050.097.065,00		3.186.517.658,00		3.285.643.013,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.261.071.572,00		2.290.471.617,00		2.394.438.372,00		2.501.533.555,00		2.579.350.604,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	88,14	91,1	93,15	2.261.071.572,00	94,8	2.290.471.617,00	96,6	2.394.438.372,00	98,75	2.501.533.555,00	100	2.579.350.604,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					64.439.760,00		80.865.537,00		84.536.103,00		88.317.119,00		91.064.465,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	5,23	4,65	4,07	64.439.760,00	3,49	80.865.537,00	2,91	84.536.103,00	2,33	88.317.119,00	1,74	91.064.465,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					429.862.143,00		546.324.389,00		571.122.590,00		596.666.984,00		615.227.944,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	93	93,3	93,7	429.862.143,00	94	546.324.389,00	94,6	571.122.590,00	95	596.666.984,00	96	615.227.944,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					101.655.398.961,00		104.441.500.796,00		107.997.572.531,00		111.648.347.130,00		114.665.788.500,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					60.069.724.431,00		63.426.259.831,00		65.120.609.528,00		66.853.641.637,00		68.477.621.062,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	60.069.724.431,00	100	63.426.259.831,00	100	65.120.609.528,00	100	66.853.641.637,00	100	68.477.621.062,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					26.957.001.006,00		30.033.472.623,00		31.396.721.419,00		32.800.991.276,00		33.821.355.907,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	222.055	236.919	252.497	26.957.001.006,00	269.098	30.033.472.623,00	286.791	31.396.721.419,00	305.648	32.800.991.276,00	325.744	33.821.355.907,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	7.907	8.066	8.228		8.394		8.562		8.734		8.910		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					11.120.256.472,00		7.107.964.434,00		7.430.601.915,00		7.762.947.772,00		8.004.435.514,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola (Hektar)	10.300	10.350	10.400	11.120.256.472,00	10.500	7.107.964.434,00	10.700	7.430.601.915,00	10.800	7.762.947.772,00	11.000	8.004.435.514,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.151.554.159,00		1.737.342.728,00		1.816.202.419,00		1.897.435.051,00		1.956.459.963,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	1.151.554.159,00	100	1.737.342.728,00	100	1.816.202.419,00	100	1.897.435.051,00	100	1.956.459.963,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.356.862.893,00		2.136.461.180,00		2.233.437.250,00		2.333.331.394,00		2.405.916.054,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10,83	12,8	18,7	2.356.862.893,00	24,61	2.136.461.180,00	30,51	2.233.437.250,00	36,42	2.333.331.394,00	42,32	2.405.916.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	68	68	72		76		84		92		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					104410772436.00		107359162339.00		111047669596.00		114834864788.00		117951431513.00	

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan dan subkegiatan yang disusun merupakan penjabaran dari program dalam RPJMD 2025 -2029. Dalam merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra, Dinas PTPH menggunakan Teknik perumusan berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Teknik ini dijelaskan pada table sebagai berikut :

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							
- Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)		
					Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura (Poin)		
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan			Indeks Ketersediaan Pangan (Indeks)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	2.09.03.1.01.0015 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02.0007 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi&	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04.0001 - Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersedianya Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
		Meningkatnya Pendapatan Petani			NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)		
					NTUP Sub Sektor Hortikultura (Poin)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Tersedianya pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola (Hektar)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
					Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
					Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	3.27.07.1.03.0005 - Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
					Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan untuk mencapai sasaran berasal dari APBD Provinsi Riau, selama periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2. (Tabel 4.3 Innendagri Nomor 2 Tahun 2025) di bawah ini.

Tabel 4.3. Rencana/Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.755.373.475,00		2.917.661.543,00		3.050.097.065,00		3.186.517.658,00		3.285.643.013,00			
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.261.071.572,00		2.290.471.617,00		2.394.438.372,00		2.501.533.555,00		2.579.350.604,00			
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	88,14	91,1	93,15	2.261.071.572,00	94,8	2.290.471.617,00	96,6	2.394.438.372,00	98,75	2.501.533.555,00	100	2.579.350.604,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					883.071.572,00		924.000.000,00		965.938.000,00		1.009.172.000,00		1.040.556.900,00			
Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	0	1	883.071.572,00	1	924.000.000,00	1	965.938.000,00	1	1.009.172.000,00	1	1.040.556.900,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					455.221.572,00		500.000.000,00		522.700.000,00		546.065.000,00		563.047.600,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0	1	1	455.221.572,00	1	500.000.000,00	1	522.700.000,00	1	546.065.000,00	1	563.047.600,00			
2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					166.800.000,00		165.000.000,00		172.490.000,00		180.200.000,00		185.804.200,00		RIAU	
Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	1	166.800.000,00	1	165.000.000,00	1	172.490.000,00	1	180.200.000,00	1	185.804.200,00			
2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					28.850.000,00		28.000.000,00		29.270.000,00		30.580.000,00		31.531.000,00		RIAU	
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	0	1	1	28.850.000,00	1	28.000.000,00	1	29.270.000,00	1	30.580.000,00	1	31.531.000,00			
2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi					110.250.000,00		110.000.000,00		114.994.000,00		120.135.000,00		123.871.100,00		RIAU	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0	1	1	110.250.000,00	1	110.000.000,00	1	114.994.000,00	1	120.135.000,00	1	123.871.100,00			
2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi					55.125.000,00		55.000.000,00		57.497.000,00		60.067.000,00		61.935.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	1	1	1	55.125.000,00	1	55.000.000,00	1	57.497.000,00	1	60.067.000,00	1	61.935.000,00			
2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					11.700.000,00		11.000.000,00		11.490.000,00		12.060.000,00		12.435.000,00		RIAU	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	0	1	11.700.000,00	1	11.000.000,00	1	11.490.000,00	1	12.060.000,00	1	12.435.000,00			
2.09.03.1.01.0015 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi					55.125.000,00		55.000.000,00		57.497.000,00		60.065.000,00		61.933.000,00		RIAU	
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	0	0	1	55.125.000,00	1	55.000.000,00	1	57.497.000,00	1	60.065.000,00	1	61.933.000,00			
2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					1.105.000.000,00		1.105.000.000,00		1.155.160.000,00		1.206.800.000,00		1.244.350.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	62	75	85	1.105.000.000,00	50	1.105.000.000,00	50	1.155.160.000,00	50	1.206.800.000,00	50	1.244.350.000,00			
2.09.03.1.02.0007 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					1.105.000.000,00		1.105.000.000,00		1.155.160.000,00		1.206.800.000,00		1.244.350.000,00		RIAU	
Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	62	75	85	1.105.000.000,00	50	1.105.000.000,00	50	1.155.160.000,00	50	1.206.800.000,00	50	1.244.350.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					273.000.000,00		261.471.617,00		273.340.372,00		285.561.555,00		294.443.704,00			
Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi&	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	1	273.000.000,00	1	261.471.617,00	1	273.340.372,00	1	285.561.555,00	1	294.443.704,00			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					185.000.000,00		185.000.000,00		193.400.000,00		202.045.000,00		208.328.600,00		RIAU	
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5	1	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	193.400.000,00	1	202.045.000,00	1	208.328.600,00			
2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					55.000.000,00		50.000.000,00		52.270.000,00		54.606.469,00		56.304.700,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	0	1	1	55.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.270.000,00	1	54.606.469,00	1	56.304.700,00			
2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun					25.000.000,00		19.471.617,00		20.355.000,00		21.265.000,00		21.926.300,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	1	25.000.000,00	1	19.471.617,00	1	20.355.000,00	1	21.265.000,00	1	21.926.300,00			
2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi					8.000.000,00		7.000.000,00		7.315.372,00		7.645.086,00		7.884.104,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	0	1	1	8.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.315.372,00	1	7.645.086,00	1	7.884.104,00			
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					64.439.760,00		80.865.537,00		84.536.103,00		88.317.119,00		91.064.465,00			
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	5,23	4,65	4,07	64.439.760,00	3,49	80.865.537,00	2,91	84.536.103,00	2,33	88.317.119,00	1,74	91.064.465,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi					35.000.000,00		45.000.000,00		47.043.000,00		49.147.000,00		50.675.500,00			
Tersedianya Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	47.043.000,00	1	49.147.000,00	1	50.675.500,00			
2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota					35.000.000,00		45.000.000,00		47.043.000,00		49.147.000,00		50.675.500,00		RIAU	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	47.043.000,00	1	49.147.000,00	1	50.675.500,00			
2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					29.439.760,00		35.865.537,00		37.493.103,00		39.170.119,00		40.388.965,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	0	1	1	29.439.760,00	1	35.865.537,00	1	37.493.103,00	1	39.170.119,00	1	40.388.965,00			
2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi					29.439.760,00		35.865.537,00		37.493.103,00		39.170.119,00		40.388.965,00		RIAU	
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	0	1	1	29.439.760,00	1	35.865.537,00	1	37.493.103,00	1	39.170.119,00	1	40.388.965,00			
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					429.862.143,00		546.324.389,00		571.122.590,00		596.666.984,00		615.227.944,00			
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	93,0	93,3	93,7	429.862.143,00	94,0	546.324.389,00	94,6	571.122.590,00	95,0	596.666.984,00	96,0	615.227.944,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					429.862.143,00		546.324.389,00		571.122.590,00		596.666.984,00		615.227.944,00			
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	6	1	1	429.862.143,00	3	546.324.389,00	4	571.122.590,00	4	596.666.984,00	5	615.227.944,00			
	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	93	80	43		90		90		95		95				
2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan					186.721.030,00		237.065.678,00		247.828.000,00		258.915.000,00		266.970.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	93	80	43	186.721.030,00	90	237.065.678,00	90	247.828.000,00	95	258.915.000,00	95	266.970.000,00			
2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					243.141.113,00		309.258.711,00		323.294.590,00		337.751.984,00		348.257.944,00		RIAU	
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	6	1	1	243.141.113,00	3	309.258.711,00	4	323.294.590,00	4	337.751.984,00	5	348.257.944,00			
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					101.655.398.961,00		104.441.500.796,00		107.997.572.531,00		111.648.347.130,00		114.665.788.500,00			
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					60.069.724.431,00		63.426.259.831,00		65.120.609.528,00		66.853.641.637,00		68.477.621.062,00			
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	60.069.724.431,00	100	63.426.259.831,00	100	65.120.609.528,00	100	66.853.641.637,00	100	68.477.621.062,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					143.909.474,00		200.000.000,00		206.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00			
Terlaksananya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5	-	-	143.909.474,00	1	200.000.000,00	1	206.000.000,00	1	215.000.000,00	1	220.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	1		1		1		1		1				
3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					143.909.474,00		170.000.000,00		171.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		RIAU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1	1	143.909.474,00	1	170.000.000,00	1	171.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00			
3.27.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00			
3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.467.195.377,00		52.065.693.431,00		53.368.109.528,00		54.787.141.637,00		56.024.621.062,00			
Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	300	300	300	49.467.195.377,00	300	52.065.693.431,00	300	53.368.109.528,00	300	54.787.141.637,00	300	56.024.621.062,00			
3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					49.467.195.377,00		52.065.693.431,00		53.368.109.528,00		54.787.141.637,00		56.024.621.062,00		RIAU	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	300	300	300	49.467.195.377,00	300	52.065.693.431,00	300	53.368.109.528,00	300	54.787.141.637,00	300	56.024.621.062,00			
3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					115.500.000,00		138.576.900,00		143.000.000,00		150.000.000,00		157.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	1	115.500.000,00	1	138.576.900,00	1	143.000.000,00	1	150.000.000,00	1	157.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	1	1		7		7		7		7				
3.27.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					105.000.000,00		125.979.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	1	105.000.000,00	1	125.979.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	140.000.000,00			
3.27.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.500.000,00		12.597.900,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	1	1	10.500.000,00	7	12.597.900,00	7	13.000.000,00	7	15.000.000,00	7	17.000.000,00			
3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					102.500.000,00		122.989.500,00		128.000.000,00		133.000.000,00		138.000.000,00			
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	1	102.500.000,00	1	122.989.500,00	1	128.000.000,00	1	133.000.000,00	1	138.000.000,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					50.000.000,00		60.000.000,00		62.000.000,00		65.000.000,00		68.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	62.000.000,00	1	65.000.000,00	1	68.000.000,00			
3.27.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					52.500.000,00		62.989.500,00		66.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	1	52.500.000,00	1	62.989.500,00	1	66.000.000,00	1	68.000.000,00	1	70.000.000,00			
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.601.971.341,00		1.947.000.000,00		2.018.000.000,00		2.074.500.000,00		2.107.500.000,00			
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	5	1.601.971.341,00	5	1.947.000.000,00	5	2.018.000.000,00	5	2.074.500.000,00	5	2.107.500.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	5		5		5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	1		1		1		1		1				
3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					81.529.209,00		104.000.000,00		109.000.000,00		113.000.000,00		116.500.000,00		RIAU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	5	81.529.209,00	5	104.000.000,00	5	109.000.000,00	5	113.000.000,00	5	116.500.000,00			
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					215.866.271,00		262.000.000,00		272.000.000,00		279.000.000,00		286.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	5	215.866.271,00	5	262.000.000,00	5	272.000.000,00	5	279.000.000,00	5	286.000.000,00			
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					241.200.000,00		297.000.000,00		308.500.000,00		317.500.000,00		325.500.000,00		RIAU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	5	241.200.000,00	5	297.000.000,00	5	308.500.000,00	5	317.500.000,00	5	325.500.000,00			
3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					95.258.861,00		121.000.000,00		127.000.000,00		131.000.000,00		135.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	5	95.258.861,00	5	121.000.000,00	5	127.000.000,00	5	131.000.000,00	5	135.000.000,00			
3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					957.617.000,00		1.150.000.000,00		1.188.000.000,00		1.220.000.000,00		1.230.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	957.617.000,00	1	1.150.000.000,00	1	1.188.000.000,00	1	1.220.000.000,00	1	1.230.000.000,00			
3.27.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.500.000,00		13.000.000,00		13.500.000,00		14.000.000,00		14.500.000,00		RIAU	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	1	10.500.000,00	1	13.000.000,00	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00	1	14.500.000,00			
3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					470.279.098,00		578.000.000,00		599.500.000,00		619.000.000,00		638.500.000,00			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	1	470.279.098,00	1	578.000.000,00	1	599.500.000,00	1	619.000.000,00	1	638.500.000,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	24	18		18		18		18		18				
3.27.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					99.917.160,00		120.000.000,00		124.000.000,00		128.000.000,00		132.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	1	99.917.160,00	1	120.000.000,00	1	124.000.000,00	1	128.000.000,00	1	132.000.000,00			
3.27.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					265.336.938,00		328.000.000,00		340.500.000,00		351.000.000,00		361.500.000,00		RIAU	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	24	18	265.336.938,00	18	328.000.000,00	18	340.500.000,00	18	351.000.000,00	18	361.500.000,00			
3.27.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					105.025.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	105.025.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	140.000.000,00	1	145.000.000,00			
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.160.191.941,00		5.930.000.000,00		6.130.500.000,00		6.279.000.000,00		6.428.500.000,00			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	5	5	6.160.191.941,00	5	5.930.000.000,00	5	6.130.500.000,00	5	6.279.000.000,00	5	6.428.500.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
3.27.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					20.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00			
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.365.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1.365.000.000,00	1	165.000.000,00	1	170.000.000,00	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00			
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.775.191.941,00		5.740.000.000,00		5.934.500.000,00		6.077.000.000,00		6.220.500.000,00		RIAU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	5	5	4.775.191.941,00	5	5.740.000.000,00	5	5.934.500.000,00	5	6.077.000.000,00	5	6.220.500.000,00			
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.873.177.200,00		2.279.000.000,00		2.357.500.000,00		2.421.000.000,00		2.583.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	6	6	1.873.177.200,00	6	2.279.000.000,00	6	2.357.500.000,00	6	2.421.000.000,00	6	2.583.500.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	62	32	32		5		5		5		5				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	303	187	237		240		240		241		241				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	20	20		20		20		20		20				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95	75	75		75		75		75		75				
3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					244.530.000,00		295.000.000,00		305.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	6	6	244.530.000,00	6	295.000.000,00	6	305.000.000,00	6	315.000.000,00	6	325.000.000,00			
3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					516.230.000,00		628.000.000,00		651.000.000,00		670.000.000,00		689.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95	75	75	516.230.000,00	75	628.000.000,00	75	651.000.000,00	75	670.000.000,00	75	689.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					9.800.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00		13.500.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	20	20	9.800.000,00	20	12.000.000,00	20	12.500.000,00	20	13.000.000,00	20	13.500.000,00			
3.27.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					223.242.200,00		278.000.000,00		287.000.000,00		294.000.000,00		300.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	303	187	237	223.242.200,00	240	278.000.000,00	240	287.000.000,00	241	294.000.000,00	241	300.000.000,00			
3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					879.375.000,00		1.066.000.000,00		1.102.000.000,00		1.129.000.000,00		1.256.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	62	32	32	879.375.000,00	5	1.066.000.000,00	5	1.102.000.000,00	5	1.129.000.000,00	5	1.256.000.000,00			
3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD					135.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00			
Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	0	1	135.000.000,00	1	165.000.000,00	1	170.000.000,00	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00			
3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					135.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		RIAU	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	0	1	135.000.000,00	1	165.000.000,00	1	170.000.000,00	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00			
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					26.957.001.006,00		30.033.472.623,00		31.396.721.419,00		32.800.991.276,00		33.821.355.907,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	222.055	236.919	252.497	26.957.001.006,00	269.098	30.033.472.623,00	286.791	31.396.721.419,00	305.648	32.800.991.276,00	325.744	33.821.355.907,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	7.907	8.066	8.228		8.394		8.562		8.734		8.910				
3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					20.039.460.744,00		22.298.902.623,00		23.311.051.419,00		24.353.893.856,00		25.111.535.907,00			
Tersedianya pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	0	1	1	20.039.460.744,00	1	22.298.902.623,00	1	23.311.051.419,00	1	24.353.893.856,00	1	25.111.535.907,00			
	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	0	0	1		1		0		0		0				
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	0	0	1		1		0		0		0				
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian					17.428.113.738,00		20.660.102.623,00		21.597.941.419,00		22.563.333.566,00		23.265.225.407,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1	17.428.113.738,00	1	20.660.102.623,00	1	21.597.941.419,00	1	22.563.333.566,00	1	23.265.225.407,00			
3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan					1.466.347.006,00		1.589.240.000,00		1.661.300.000,00		1.735.560.290,00		1.789.600.000,00		RIAU	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	0	1	1	1.466.347.006,00	1	1.589.240.000,00	1	1.661.300.000,00	1	1.735.560.290,00	1	1.789.600.000,00			
3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura					45.800.000,00		49.560.000,00		51.810.000,00		55.000.000,00		56.710.500,00		RIAU	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	0	1	1	45.800.000,00	1	49.560.000,00	1	51.810.000,00	1	55.000.000,00	1	56.710.500,00			
3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura					183.200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		RIAU	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	0	0	1	183.200.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan					916.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		RIAU	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	0	0	1	916.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					6.865.040.262,00		7.682.570.000,00		8.031.310.000,00		8.390.308.420,00		8.651.265.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	2	2	6.865.040.262,00	2	7.682.570.000,00	2	8.031.310.000,00	2	8.390.308.420,00	2	8.651.265.000,00			
	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	308	500	100		100		100		100		100				
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	2	5		2		2		2		2				
3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih					95.831.172,00		94.950.000,00		99.260.000,00		103.695.000,00		106.920.000,00		RIAU	
Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	308	500	100	95.831.172,00	100	94.950.000,00	100	99.260.000,00	100	103.695.000,00	100	106.920.000,00			
3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan					5.760.859.090,00		6.522.580.000,00		6.818.670.000,00		7.123.465.220,00		7.345.010.000,00		RIAU	
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	2	5	5.760.859.090,00	2	6.522.580.000,00	2	6.818.670.000,00	2	7.123.465.220,00	2	7.345.010.000,00			
3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura					1.008.350.000,00		1.065.040.000,00		1.113.380.000,00		1.163.148.200,00		1.199.335.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	2	2	1.008.350.000,00	2	1.065.040.000,00	2	1.113.380.000,00	2	1.163.148.200,00	2	1.199.335.000,00			
3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					52.500.000,00		52.000.000,00		54.360.000,00		56.789.000,00		58.555.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	5	1	1	52.500.000,00	1	52.000.000,00	1	54.360.000,00	1	56.789.000,00	1	58.555.000,00			
3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme					52.500.000,00		52.000.000,00		54.360.000,00		56.789.000,00		58.555.000,00		RIAU	
Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (Laporan)	5	1	1	52.500.000,00	1	52.000.000,00	1	54.360.000,00	1	56.789.000,00	1	58.555.000,00			
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					11.120.256.472,00		7.107.964.434,00		7.430.601.915,00		7.762.947.772,00		8.004.435.514,00			
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola (Hektar)	10.300	10.350	10.400	11.120.256.472,00	10.500	7.107.964.434,00	10.700	7.430.601.915,00	10.800	7.762.947.772,00	11.000	8.004.435.514,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian					11.120.256.472,00		7.107.964.434,00		7.430.601.915,00		7.762.947.772,00		8.004.435.514,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	0	1	11.120.256.472,00	1	7.107.964.434,00	1	7.430.601.915,00	1	7.762.947.772,00	1	8.004.435.514,00			
	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	1	1	3		3		3		3		3				
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian					692.720.000,00		395.600.000,00		418.100.000,00		441.300.000,00		458.134.000,00		RIAU	
Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	0	1	692.720.000,00	1	395.600.000,00	1	418.100.000,00	1	441.300.000,00	1	458.134.000,00			
3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani					1.914.750.000,00		1.236.800.000,00		1.304.300.000,00		1.373.800.000,00		1.424.300.000,00		RIAU	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	1	1	1.914.750.000,00	1	1.236.800.000,00	1	1.304.300.000,00	1	1.373.800.000,00	1	1.424.300.000,00			
3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani					7.762.786.472,00		4.725.564.434,00		4.958.201.915,00		5.197.847.772,00		5.372.001.514,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	1	1	1	7.762.786.472,00	1	4.725.564.434,00	1	4.958.201.915,00	1	5.197.847.772,00	1	5.372.001.514,00			
3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya					750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		RIAU	
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	1	1	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00			
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.151.554.159,00		1.737.342.728,00		1.816.202.419,00		1.897.435.051,00		1.956.459.963,00			
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	1.151.554.159,00	100	1.737.342.728,00	100	1.816.202.419,00	100	1.897.435.051,00	100	1.956.459.963,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100				
3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					1.151.554.159,00		1.737.342.728,00		1.816.202.419,00		1.897.435.051,00		1.956.459.963,00			
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	100	100	1.151.554.159,00	200	1.737.342.728,00	200	1.816.202.419,00	200	1.897.435.051,00	200	1.956.459.963,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.500	2.500	10.200		10.200		10.200		10.200		10.200				
3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					986.614.159,00		1.488.501.968,00		1.556.072.419,00		1.625.635.051,00		1.676.204.963,00		RIAU	
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.500	2.500	10.200	986.614.159,00	10.200	1.488.501.968,00	10.200	1.556.072.419,00	10.200	1.625.635.051,00	10.200	1.676.204.963,00			
3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					164.940.000,00		248.840.760,00		260.130.000,00		271.800.000,00		280.255.000,00		RIAU	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	100	100	164.940.000,00	200	248.840.760,00	200	260.130.000,00	200	271.800.000,00	200	280.255.000,00			
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.356.862.893,00		2.136.461.180,00		2.233.437.250,00		2.333.331.394,00		2.405.916.054,00			
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10,83	12,80	18,70	2.356.862.893,00	24,61	2.136.461.180,00	30,51	2.233.437.250,00	36,42	2.333.331.394,00	42,32	2.405.916.054,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	68	68	72		76		84		92		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					386.562.893,00		399.720.000,00		415.580.000,00		431.975.000,00		443.875.000,00			
Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	24	8	386.562.893,00	24	399.720.000,00	24	415.580.000,00	24	431.975.000,00	24	443.875.000,00			
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	165	225	90		90		90		90		90				
3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian					78.556.893,00		118.670.000,00		121.780.000,00		125.000.000,00		127.350.000,00		RIAU	
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	24	8	78.556.893,00	24	118.670.000,00	24	121.780.000,00	24	125.000.000,00	24	127.350.000,00			
3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					308.006.000,00		281.050.000,00		293.800.000,00		306.975.000,00		316.525.000,00		RIAU	
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	165	225	90	308.006.000,00	90	281.050.000,00	90	293.800.000,00	90	306.975.000,00	90	316.525.000,00			
3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					1.870.318.000,00		1.647.041.180,00		1.724.085.650,00		1.803.393.294,00		1.861.031.354,00			
Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	24	379	36	1.870.318.000,00	36	1.647.041.180,00	36	1.724.085.650,00	36	1.803.393.294,00	36	1.861.031.354,00			
3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani					1.870.318.000,00		1.647.041.180,00		1.724.085.650,00		1.803.393.294,00		1.861.031.354,00		RIAU	
Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	24	379	36	1.870.318.000,00	36	1.647.041.180,00	36	1.724.085.650,00	36	1.803.393.294,00	36	1.861.031.354,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					99.982.000,00		89.700.000,00		93.771.600,00		97.963.100,00		101.009.700,00			
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	2	2	99.982.000,00	2	89.700.000,00	2	93.771.600,00	2	97.963.100,00	2	101.009.700,00			
	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	0	2	2		3		3		3		3				
3.27.07.1.03.0005 - Pendampingan dan pengawalan korporasi petani					61.800.000,00		55.700.000,00		58.228.000,00		60.830.700,00		62.722.500,00		RIAU	
Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	0	2	2	61.800.000,00	3	55.700.000,00	3	58.228.000,00	3	60.830.700,00	3	62.722.500,00			
3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani					38.182.000,00		34.000.000,00		35.543.600,00		37.132.400,00		38.287.200,00		RIAU	
Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	2	2	38.182.000,00	2	34.000.000,00	2	35.543.600,00	2	37.132.400,00	2	38.287.200,00			

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
1.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
			2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
			2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
			2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			2.09.03.1.01.0015 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	
			2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
			2.09.03.1.02.0007 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
			2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
			2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	
2.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
			2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
3.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	
			3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
			3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
			3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
			3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
			3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
4.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
			3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
			3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang ditetapkan untuk mendukung sasaran daerah

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	70,42	71,93	73,46	75,04	76,64	78,28	79,95	
2	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	95,84	96,05	96,32	97,12	98,26	99,26	100,02	
3	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura	Poin	103,83	105,78	107,24	109,15	111,25	113,87	115,34	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,15	72,85	73,42	74,02	74,05	74,09	74,12	
5	NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	94,86	97,07	97,56	98,01	98,78	99,02	100,01	
6	Indeks Ketersediaan Pangan	Indeks	37,73	39,24	40,77	42,35	43,95	45,59	47,26	
7	NTUP Sub Sektor Hortikultura	Poin	104,26	104,86	105,33	106,23	106,76	107,45	107,89	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator outcome, program dan output yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	5,23	4,65	4,07	3,49	2,91	2,33	1,74	
2.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	93,0	93,3	93,7	94,0	94,6	95,0	96,0	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Skor	88,14	91,1	93,15	94,8	96,6	98,75	100	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	positif	Ton	222.055	236.919	252.497	269.098	286.791	305.648	325.744	
6.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	komulatif	Persentase	10,83	12,80	18,70	24,61	30,51	36,42	42,32	
7.	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	positif	Hektar	10.300	10.350	10.400	10.500	10.700	10.800	11.000	
8.	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	komulatif	Persentase	68	68	72	76	84	92	100	
10.	Jumlah Produksi Hortikultura	positif	Ton	7.907	8.066	8.228	8.394	8.562	8.734	8.910	

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang baik secara skala perodesasi (jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) maupun secara substansinya serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis yang disusun ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2025–2029 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029 diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah yang dijalankan dalam perspektif perencanaan pembangunan lingkup urusan dan lintas urusan dengan semangat integritas tinggi dan kolaborasi multi-sektoral dalam rangka pencapaian penyediaan pangan di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini juga bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah terutama sektor pangan dan pertanian di Provinsi Riau.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan penyusunan dokumen renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau disusun menurut mekanisme dari persiapan, penyusunan rancangan Renstra, Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir dan hingga Dokumen Renstra untuk mewujudkan pelaksanaan Renstra. Hal ini harus dilakukan untuk mensinergikan tujuan dari program pembangunan daerah sesuai tupoksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Riau. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan sasaran daerah dan sasaran nasional.

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Target indikator kinerja perangkat daerah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2025–2029 secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang nantinya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura akan melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Renstra secara Responsif gender.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, mari kita jadikan RENSTRA ini sebagai tonggak awal bagi pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Semoga melalui implementasi yang baik, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Riau.

Rencana Strategis (Renstra) ini juga bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah terutama sektor pangan dan pertanian di Provinsi Riau.

LAMPIRAN



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 276/III/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

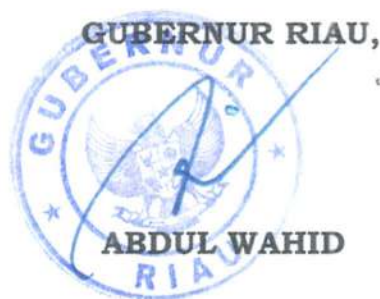
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disablilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketramigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analisis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisataan)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra 2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah





MATRIK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAB I PENDAHULUAN						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	Merupakan penjabaran RPJMD Bab I. Kedudukan Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.	Sub bab 1.1 Latar belakang halaman 1	√		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum	- Sesuaikan peraturan yang relevan dengan perencanaan dan tuisi OPD (regulasi terkait perencanaan, NSPK, pembentukan SOTK, dan tuisi PD yang penting) - Perpres RPJMN - Perda RPJMD Provinsi Riau Nomor			√	- Tambahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah - Tambahkan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan - Tambahkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 pada Dokumen Renstra - Melampirkan Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Strategis Prangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 pada Dokumen Renstra



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029	Untuk mencapai kinerja lima tahunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD	Sub bab 1.3 Maksud dan Tujuan halaman 6	√		
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029			√		
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH						
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber	Data termuat dalam Bab II RPJMD	Tabel s.d tabel halaman sd halaman			



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah; - Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah; - Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).	Menjelaskan keterkaitan Tusi PD (Pergub SOTK) dengan pencapaian sasaran dalam RPJMD	Sub bab 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura halaman 8	√		



	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	- Struktur organisasi PD telah dirancang untuk mencapai sasaran dalam RPJMD. - Jabarkan fungsional tertentu pada OPD	Sub bab 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah	√		
--	------------------------------	---	--	--	---	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya - Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	- Menjelaskan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah periode Renstra sebelumnya (Lihat Bab II RPJMD Provinsi Riau sub bab evaluasi)	Sub bab 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah halaman 36	√		
	Kelompok sasaran layanan	Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah	Mendukung program lima tahunan untuk mencapai IKU PD yang merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD		√		
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)		Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam Bab II RPJMD Provinsi Riau, terdapat beberapa mitra pembangunan yang mendukung				



			kinerja pelayanan Dinas, antara lain (nama mitra, kegiatan dan volume kegiatan serta dukungan pendanaan)				
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)		- Potensi BUMD yang mendukung pencapaian kinerja pangan (DPTPH), produksi komoditas perkebunan (Disbun)				
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)		Kerjasama daerah yang sudah berjalan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran daerah				



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah						
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia - Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. - Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. - Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan	Mengacu pada Bab II RPJMD. Uraikan terlebih dahulu permasalahan RPJMD yang terkait dengan isu perangkat daerah		√		



	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.	Mengacu pada Bab II RPJMD. Uraikan terlebih dahulu isu strategis RPJMD yang terkait dengan isu perangkat daerah		√		
--	--------------------------------	---	--	--	---	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD Tambahkan Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 44)					
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						



Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	Tambahkan Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 47) Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: - Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; - Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan: - kalimat kondisi; - dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;	Uraikan terlebih dahulu Tujuan RPJMD (yang terkait dengan PD). Dijelaskan bahwa Sasaran RPJMD diturunkan menjadi Tujuan PD.		√		
---	---	--	--	---	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome Tambahkan Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) halaman 46					



Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada: a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan: a. kalimat kondisi; b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome	Uraikan terlebih dahulu Sasaran RPJMD (yang terkait dengan PD).		√		
--	---	---	--	---	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025- 2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah- yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD	Uraikan terlebih dahulu strategi RPJMD (yang terkait dengan PD).		√		
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD Tambahkan Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Halaman 51)	Uraikan terlebih dahulu Arah Kebijakan RPJMD (yang terkait dengan PD).		√		
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN						



	Uraian Program	- Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output	Uraikan terlebih dahulu program prioritas dan kaitan dengan prioritas KDH (yang terkait dengan PD)		√		
	Uraian Kegiatan	- Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 49)	Penjelasan bahwa kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari program dalam RPJMD		√		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dalam Negeri beserta pmutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output					
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	- Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pmutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)				√	- Sesuaikan uraian pagu tahun 2026 dengan uraian pagu pada RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 - Agar output kegiatan disesuaikan dengan output referensi
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)				√	



	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 51)	Mengacu pada IV RPJMD		√		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	- Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. - Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 52)	Mengacu pada Bab IV RPJMD		√		
5	BAB V PENUTUP						
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			√		



	Lampiran						Agar dapat melampirkan : - Cascading hasil input SIPD - Form penyesuaian Renstra dengan RPJMN 2025-2029 - Metadata pembentuk IKU dan IKK - Membuat tagging program/kegiatan/subkegiatan dalam mendukung pelaksanaan Green for Riau - Hasil review Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Hasil review Inspektorat terhadap Rakhir Renstra PD
	Catatan Penting						- Agar dapat menindaklanjuti integrasi isu gender dan pengentasan kemiskinan - Agar menindaklanjuti review Inspektorat terhadap Rakhir Renstra PD - Menyesuaikan referensi output kegiatan



**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU**

♀ **SEKRETARIS**

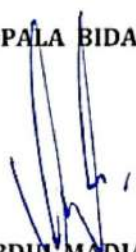

IGA RETNOMO
NIP. 19640312 200604 1 006

Pekanbaru, Oktober 2025

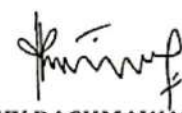
Diverifikasi Oleh:

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

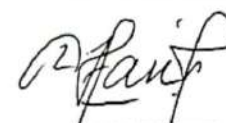
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM


ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

PERENCANA AHLI MUDA


RIZKY RACHMAWATI
NIP. 19800331 200903 2 002

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


DESY HAIRANY
NIP. 19800122 200501 2 009

Form Penyelarasan

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodisasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 – 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
				3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 – 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 – 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
				3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
			3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
				3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 – 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
		2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Lokal	

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis	2.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.0106. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
				2.09.05.1.0107Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Pendapatan Petani	- NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin) - NTUP Sub Sektor Hortikultura (Poin)	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2. Dinas Perkebunan 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Sekretariat Daerah Biro Ekonomi 5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Dinas Pariwisata
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan	Meningkatnya Pendapatan Petani	- NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)	1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kesejahteraan Petani		- NTUP Sub Sektor Hortikultura (Poin)	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
1	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (persen)	3,5	3,3	Kementerian Pertanian						Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Indeks Kesejahteraan Petani	0,7445	0,8599	Kementerian Pertanian	1. NTP Sub Sektor Tanaman Pangan			96,05	78,28	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					2. NTP Sub Sektor Hortikultura			105,78	99,26	
						1. NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan		97,07	100,01	
						2. NTUP Sub Sektor Hortikultura		104,86	107,45	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
							Jumlah produksi tanaman pangan	236.919 Ton	305.648 Ton	
							Jumlah Produksi Hortikultura	8.066 Ton	8.734 Ton	
3	Lahan baku sawah yang dicetak (Ha)	42	79,81	Kementerian Pertanian						
4	Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman (ribu Ha)	6,9	12,12	Kementerian Pertanian	1. NTP Sub Sektor Tanaman Pangan			96,05	78,28	
					2. NTP Sub Sektor Hortikultura			105,78	99,26	
						1. NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan		97,07	100,01	
						2. NTUP Sub Sektor Hortikultura		104,86	107,45	
							Cakupan Luas Lahan Pertanian	10,35 Ha	10,8 Ha	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
							LP2B yang dikelola			
5	Produksi padi	54,45	56,05	Kementerian Pertanian	1. NTP Sub Sektor Tanaman Pangan			96,05	78,28	
					2. NTP Sub Sektor Hortikultura			105,78	99,26	
						1. NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan		97,07	100,01	
						2. NTUP Sub Sektor Hortikultura		104,86	107,45	
							Jumlah produksi tanaman pangan	236.919 Ton	305.648 Ton	
6	Produksi buah dan sayur (juta ton)	30,66	35,47	Kementerian Pertanian	1. NTP Sub Sektor Tanaman Pangan			96,05	78,28	
					2. NTP Sub Sektor Hortikultura			105,78	99,26	
						1. NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan		97,07	100,01	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
						2. NTUP Sub Sektor Hortikultura		104,86	107,45	
							Jumlah Produksi Hortikultura	8.066 Ton	8.734 Ton	
7	Jumlah komoditas yang terfortifikasi	3	4	Kementerian Pertanian	1. NTP Sub Sektor Tanaman Pangan			96,05	78,28	
					2. NTP Sub Sektor Hortikultura			105,78	99,26	
						1. NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan		97,07	100,01	
						2. NTUP Sub Sektor Hortikultura		104,86	107,45	
							Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	93,3 Persen	95 Persen	
8	Jumlah kelembagaan	125	145	Kementerian Pertanian	1. NTP Sub Sektor			96,05	78,28	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	ekonomi yang terfasilitasi (lembaga)				Tanaman Pangan					
					2. NTP Sub Sektor Hortikultura			105,78	99,26	
						1. NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan		97,07	100,01	
						2. NTUP Sub Sektor Hortikultura		104,86	107,45	
9	Persentase petani muda terhadap jumlah petani (persen)	22,03	22,43	Kementerian Pertanian						
10	Pertumbuhan PDB tanaman hortikultura (persen)	1,36	3,04	Kementerian Pertanian						
11	Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan (persen)	11,10	13	Kementerian Pertanian						
12	Persentase lahan baku	75	87	Kementerian Pertanian						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (persen)									
13	Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas (persen)	1,47	1,55	Kementerian Pertanian						
14	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan (varietas)	30	30	Kementerian Pertanian						
15	Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada	0,091	0,439	Kementerian Pertanian						

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	sektor pertanian									

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan pengadaan dan Pengeloan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.0007 - Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden				1. Semua OPD
	Swasembada Pangan	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
				3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	
				3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
				3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
				3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
		- 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	3.27.02.1.03.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kewenangan Provinsi		
			3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
				3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
				3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
	Makanan Bergizi Gratis	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	

Metadata

1. Nama Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Institusi Penghasil : Badan Pangan Nasional

Definisi : Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah skor komposit yang mengukur capaian ketahanan pangan suatu wilayah dengan menggunakan beberapa indikator yang mencakup tiga aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. IKP berfungsi sebagai alat untuk menilai kondisi ketahanan pangan di tingkat daerah, mengidentifikasi area yang perlu intervensi program, dan menentukan prioritas pembangunan.

Interpretasi :

Menunjukkan kategori ketahanan pangan suatu wilayah misalnya "Kurang Tahan Pangan", "Cukup Tahan Pangan", atau "Tahan Pangan Tinggi".

Metode/Rumus Perhitungan : Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Aspek kecukupan pangan dilihat dari tiga indikator yaitu kecukupan persediaan pangan, tidak kekurangan pangan, dan ketakutan kekurangan pangan. Indikator tersebut diperoleh dari kuesioner SPP dengan pemberian skor.

Aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial diperoleh dari tiga indikator yaitu indikator pangan yang diproduksi di kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau pembelian serta indikator harga pembelian tidak tinggi.

Aspek kecukupan asupan dideteksi dari indikator tidak ada balita yang kurang gizi atau berat badan yang rendah serta indikator tidak adanya balita yang meninggal karena sakit.

Aspek kualitas air diwakili oleh indikator sumber air minum utama dan indikator sumber air untuk memasak. Semakin baik kualitas air yang dimanfaatkan rumah tangga akan menghindarkan anggota rumah tangga mengalami kesehatan yang buruk.

Masing-masing aspek dibuat skoring kemudian dikonversikan dalam persentase. IKP diperoleh dari rata-rata persentase ketiga dimensi yang telah dihitung

Ukuran/Satuan: skor indeks

Judul Publikasi/Sumber Data: <https://badanpangan.go.id/buku-digital>

Tahun Data Tersedia: 2018 - 2025

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

2. Nama Indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi : indeks yang mengukur rasio antara harga yang diterima petani(l sektor tanaman pangan untuk hasil panen mereka dengan harga yang mereka bayar untuk biaya produksi.

Interpretasi : Untuk menilai kelayakan usaha dan kesejahteraan petani secara umum.

Metode/Rumus Perhitungan : Rasio antara harga yang diterima petani sektor tanaman pangan (It) untuk hasil panen mereka dengan harga yang mereka bayar untuk biaya produksi (Ib).

Ukuran/Satuan: Nilai

Judul	Publikasi/Sumber	Data:	berita	resmi	statistic
	https://www.bps.go.id/id/pressrelease				

Tahun Data Tersedia: 2015 - 2025

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

3. Nama Indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Hortikultura

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi : indeks yang mengukur rasio antara harga yang diterima(It) petani sektor hortikultura untuk hasil panen mereka dengan harga yang mereka bayar untuk biaya produksi(Ib).

Interpretasi : Untuk menilai kelayakan usaha dan kesejahteraan petani secara umum.

Metode/Rumus Perhitungan : rasio antara harga yang diterima petani(It) sektor hortikultura untuk hasil panen mereka dengan harga yang mereka bayar untuk biaya produksi(Ib).

Ukuran/Satuan: Nilai

Judul	Publikasi/Sumber	Data:	berita	resmi	statistic
	https://www.bps.go.id/id/pressrelease				

Tahun Data Tersedia: 2015 - 2025

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

4. Nama Indikator Jumlah produksi tanaman pangan

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi : Jumlah produksi tanaman pangan (padi) yang dihasilkan

Interpretasi : Untuk menilai kinerja produksi tanaman pangan

Metode/Rumus Perhitungan : perkalian antara luas panen dan produktifitas tanaman pangan. Data luas panen padi dihitung diperoleh dari Survei Kerangka Sampel Area (KSA). Data produktivitas padi dan jagung diperoleh dari hasil Survei Ubinan.

Ukuran/Satuan: Ton

Judul	Publikasi/Sumber	Data:	berita	resmi	statistic
	https://www.bps.go.id/id/publication				

Tahun Data Tersedia: 2018 - 2024

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

5. Nama Indikator Jumlah produksi hortikultura

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi : Jumlah produksi hortikultura yang dihasilkan

Interpretasi : Untuk menilai kinerja produksi hortikultura

Metode/Rumus Perhitungan : perkalian antara luas panen dan produktifitas hortikultura.

Ukuran/Satuan: Ton

Judul Publikasi/Sumber Data: berita resmi statistic

<https://www.bps.go.id/id/publication>

Tahun Data Tersedia: 2019 - 2024

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

6. Nama Indikator Cakupan luas lahan pertanian LP2B yang dikelola

Institusi Penghasil : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi : luas lahan pertanian yang sudah ditetapkan dalam LP2B yang dikelola

Interpretasi : Untuk menilai luas lahan pertanian yang fungsional

Metode/Rumus Perhitungan : luas lahan pertanian yang diintervensi kinerjanya

Ukuran/Satuan: Ha

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Bidang/UPT

Tahun Data Tersedia: 2019 - 2024

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

7. Nama Indikator Persentase Penanganan Bencana Pertanian

Institusi Penghasil : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi : luas lahan pertanian yang ditangani bencana

Interpretasi : Untuk menilai kinerja penanganan bencana pertanian per tahun

Metode/Rumus Perhitungan : persentase luas lahan pertanian yang ditangani bencana yaitu luas lahan pertanian yang mengalami bencana dibagi luas lahan pertanian yang ditangani bencana dikali 100 Persen.

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Bidang/UPT

Tahun Data Tersedia: 2019 - 2024

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

8. Nama Indikator Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian

Institusi Penghasil : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi : penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian

Interpretasi : Untuk menilai kinerja penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian

Metode/Rumus Perhitungan : persentase luas lahan pertanian yang ditangani dampak perubahan iklim terhadap pertanian yaitu luas lahan pertanian yang mengalami dampak perubahan iklim terhadap pertanian dibagi luas lahan pertanian yang ditangani dampak perubahan iklim dikali 100 Persen.

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun Data Tersedia: 2019 - 2024

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

9. Nama Indikator Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan

Institusi Penghasil : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi : Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan

Interpretasi : Untuk menghitung jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan ditingkatkan kualitasnya

Metode/Rumus Perhitungan : persentase jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kualitasnya yaitu jumlah SDM pertanian yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah SDM pertanian yang tersedia dikali 100 Persen.

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Bidang/UPT

Tahun Data Tersedia: 2019 - 2024

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

10. Persentase kelompok yang membentuk koorporasi

Institusi Penghasil : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi : Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan

Interpretasi : Untuk menghitung jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan ditingkatkan kualitasnya

Metode/Rumus Perhitungan : persentase jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kualitasnya yaitu jumlah SDM pertanian yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah SDM pertanian yang tersedia dikali 100 Persen.

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Bidang/UPT

Tahun Data Tersedia: 2019 - 2024

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

11. Skor PPH

Institusi Penghasil : Badan Pangan Nasional

Definisi : Skor Pola Pangan Harapan adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan, yang menunjukkan seberapa baik pola makan masyarakat memenuhi kriteria keberagaman, keseimbangan, dan kecukupan gizi

Interpretasi : Untuk menghitung Skor Pola Pangan Harapan

Metode/Rumus Perhitungan : Rata-rata Skor PPH (Skor PPH Konsumsi ditambah Skor PPH Ketersediaan dibagi 2(dua).

Ukuran/Satuan: Persen

Judul

Publikasi/Sumber

Data:

<https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications/1j9/skorpph-konsumsi-provinsi>

dan

<https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications/vy/skor-pola-pangan-harapan-ketersediaan>

Tahun Data Tersedia: 2018 - 2023

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

12. Persentase daerah rentan rawan pangan

Institusi Penghasil : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi : kondisi wilayah yang ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi kebutuhan standar.

Interpretasi : : Kinerja penanganan daerah rentan rawan pangan

Metode/Rumus Perhitungan : Jumlah kecamatan rentan pangan dibagi jumlahkecamatan dikali100 persen

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun Data Tersedia: 2018 - 2023

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

13. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan

Institusi Penghasil : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi : jumlah pangan segar yang diperiksa mutu keamanannya.

Interpretasi : Kinerja pemenuhan mutu pangan

Metode/Rumus Perhitungan : Jumlah pangan yang dinyatakan segar dibagi jumlah pangan yang diperiksa mutunya dikali 100 persen

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun Data Tersedia: 2018 - 2023

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: ya

TAGGING PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN GREEN FOR RIAU TAHUN 2025 - 2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju						
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah						
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Pendapatan Petani	Meningkatnya Pendapatan Petani	- NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan (Poin)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				-NTUP Sub Sektor Hortikultura (Poin)	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Pupuk Organik
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Penyediaan Benih bersertifikat
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Benih bersertifikat
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Benih bersertifikat, Benih Tanaman Pohon
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan LP2B
					Penataan Prasarana Pertanian	
					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	mendukung pertanian berkelanjutan
					Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
					Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
					Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
					Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
					Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
					Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029



NOMOR : 330/LHR/INSP-RIAU/lr.II/X/2025

TANGGAL : 13 OKTOBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Nomor : 330/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan
Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
Tahun 2025-2029

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

Yth. Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Riau
di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung

lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil revidi yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Revidi Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Revidi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025 dan SPT perpanjangan Nomor 348/SPT/2025 tanggal 08 Oktober 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah; dan
 - b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif sesuai pembedangannya yang pertanggungjawabannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Untuk mencapai kinerja lima tahunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029;

4. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029; dan
5. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk melengkapi hasil capaian akhir periode Renstra sebelumnya yang menjadi acuan dalam penetapan *baseline* target IKU pada Renstra DPTPH Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk melengkapi hasil capaian akhir periode Renstra sebelumnya yang menjadi acuan dalam penetapan *baseline* target IKD pada Renstra DPTPH Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 Data Statistik Sektorial Daerah pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,** 



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256

email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh/ Tanggal	Irfan Adi Putra/	Oktober 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto /	Oktober 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/	Oktober 2025
Uraian Catatan Hasil Reviu			
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:			
DATA UMUM			
Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani			
Sasaran: 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. 2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan 3. Meningkatnya Pendapatan Petani			
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.			
B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.			
C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029. 1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah: Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.			

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

- D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk melengkapi hasil capaian akhir periode Renstra sebelumnya yang menjadi acuan dalam penetapan *baseline* target IKU pada Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk melengkapi hasil capaian akhir periode Renstra sebelumnya yang menjadi acuan dalam penetapan *baseline* target IKD pada Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2025-2029

- E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

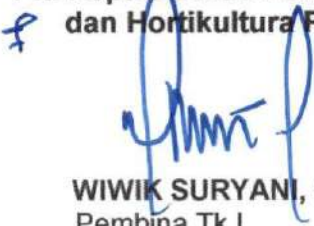
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

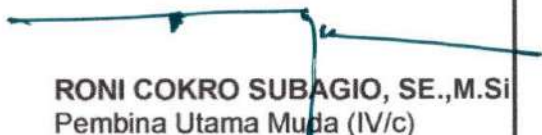
Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Riau


WIWIK SURYANI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19810915 200012 2 002

Supervisor/Pengendali Teknis


RONI COKRO SUBAGIO, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196712051998031003



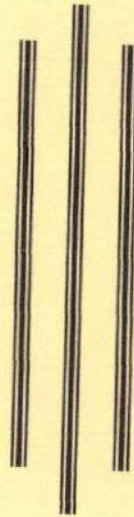
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAMPIRAN
KERTAS KERJA REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029



NOMOR : 330/LHR/INSP-RIAU/II/X/2025
TANGGAL : 13 OKTOBER 2025

Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

KKR I

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD												HASIL REVIU APIP		CATATAN/REKOMENDASI
NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN					
									YA	TIDAK				
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	- Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	✓		Program, Kegiatan dan Subkegiatan sudah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah			
2						Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	✓					
3						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	✓					
4						Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	✓					
5						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	✓					
6						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	✓					
7						2.09.03.1.01.0015 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	✓					
8						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	✓				
9					Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	✓					
10						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	✓					
11						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	✓					
12						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	✓					
13					- Meningkatkan penanganan kerawanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen		✓		
14							Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen		✓		
15					- Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat		✓		
16								Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen		✓		

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		CATATAN/REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		
									YA	TIDAK	
17	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Terpenuhiya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	✓			
18					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	✓			
19					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	✓		
20				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	✓			
21					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	✓			
22				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	✓			
23					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	✓			
24				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	✓			
25					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	✓			
26					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	✓			
27					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	✓			
28					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	✓			
29					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	✓			
30				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	✓			
31					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	✓			
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		✓						

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		CATATAN/REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		
									YA	TIDAK	
33					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	✓		
34						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	✓		
35						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	✓		
36					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	✓		
37						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	✓		
38						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	✓		
39						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	✓		
40						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	✓		
41					Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	✓		
42					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	✓		
43						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	✓		
44						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	✓		
45						Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	✓		
46						Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	✓		
47						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	✓		
48					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	✓		
49						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai	Laporan	✓		

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD									HASIL REVIU APIP		CATATAN/REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN			
									YA	TIDAK		
50		Meningkatnya Pendapatan Petani			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	✓			
51						Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	✓			
52						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	✓			
53				- Meningkatkan distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	✓		
54						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	✓			
55				- Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	✓		
56							Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	✓		
57							Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	✓		
58							Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	✓		
59				- Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	✓		
60							Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	✓		
61						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	✓		

Pengujian Keselarasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	Hasil Reviu APIP Keselarasan		CATATAN/REKOMENDASI
					YA	Tidak	
1	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	IKU	TUJUAN	✓		Indikator Kinerja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah
2	NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan	Poin	IKU	SASARAN	✓		
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	IKU	TUJUAN	✓		
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	IKD	PROGRAM	✓		
5	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	IKD	PROGRAM	✓		
6	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	IKD	PROGRAM	✓		
7	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	IKD	PROGRAM	✓		
8	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	IKD	PROGRAM	✓		
9	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura	Poin	IKU	TUJUAN	✓		
10	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	IKD	PROGRAM	✓		
11	NTUP Sub Sektor Hortikultura	Poin	IKU	SASARAN	✓		
12	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	IKU	SASARAN	✓		
13	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	IKD	PROGRAM	✓		
14	Indeks Ketersediaan Pangan	Indeks	IKU	SASARAN	✓		
15	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	IKD	PROGRAM	✓		
16	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	Persentase	IKD	PROGRAM	✓		
17	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	Hektar	IKD	PROGRAM	✓		

Pengujian Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP		CATATAN/REKOMENDASI
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		YA	TIDAK	
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	✓		

Pengujian Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASILREVIU APIP		CATATAN/REKOMENDASI
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		KETERHUBUNGAN		
				YA	TIDAK	
1	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (Prioritas)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		Program Perangkat Daerah pada RPJMD sudah konsisten dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
2	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN (Prioritas)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
3	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN(Non Prioritas)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
4	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
5	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Prioritas)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
6	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Prioritas)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
7	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER(Non Prioritas)	-	-	✓		
8	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		
9	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (Prioritas)	-	-	✓		
10	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	✓		

Pengujian Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

KKR V

Pengujian Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya																	KAR V
NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU APIP		
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTA SE CAPAI KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						KESELARASAN		CATATAN/REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5			
1	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan	Ton	2019	11262153	10426928	9260%	10428770	11256369	11322111	11633881	11947412	12279392	12621176	✓		
2	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN	Jumlah Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan	Kg/Ha/Tahun	2019	N/A	N/A	NaN%	13402	13536	13671	13808	13946	14086	14226	✓		
3	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN	Peningkatan Harga Komoditi Utama Perkebunan	Rp	2019	N/A	N/A	NaN%	3099.00	3408.90	3749.79	4124.76	4537.23	4990.95	5490.04	✓		
4	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	2019	N/A	N/A	NaN%	70.70	71.00	71.40	71.80	72.20	72.60	73.00	✓		
5	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan	Ton	2019	11262153	10426928	9260%	10428770	11256369	11322111	11633881	11947412	12279392	12621176	✓		

Pengujian Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5								HASIL REVIU PIP	
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						KESELARASAN		CATATAN/REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	YA	TIDAK	
1	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	N/A	N/A	N/A	NaN%	93.0	93.3	93.7	94.0	94.6	95.0	96.0	✓		Penetapan Target IKD sudah selaras dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya
2	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	N/A	N/A	N/A	NaN%	100	100	100	100	100	100	100	✓		
3	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	N/A	N/A	N/A	NaN%	10.83	12.80	18.70	24.61	30.51	36.42	42.32	✓		
4	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	103.5	103.8	96.65	9311175337186890%	7907	8066	8228	8394	8562	8734	8910	✓		
5	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	N/A	N/A	N/A	NaN%	5.23	4.65	4.07	3.49	2.91	2.33	1.74	✓		
6	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87.03	96	N/A	NaN%	88.14	91.1	93.15	94.8	96.6	98.75	100	✓		
7	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	N/A	N/A	N/A	NaN%	222055	236919	252497	269098	286791	305848	325744	✓		
8	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	N/A	N/A	N/A	NaN%	100	100	100	100	100	100	100	✓		
9	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	Persentase	N/A	N/A	N/A	NaN%	68	68	72	76	84	92	100	✓		
10	2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B yang dikelola	Hektar	N/A	N/A	N/A	NaN%	10300	10350	10400	10500	10700	10800	11000	✓		

Pengujian Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

NO	BIDANG URUSAN	RESTRASI PD						DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)							CATATAN/REKOMENDASI				
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN		2022	2023	2024	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5							
1			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			1	1		Penetapan Target Subkegiatan belum selaras dengan Data Statistik Sektoral Daerah Agar menyajikan satuan dan data capaian Tahun 2024 pada DSSD
2														Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan		245	256		
3				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	500	100	100	100	100	100	Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan		107	118			
4													Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan		87	57			
5													Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia		557.84	488.26			
6													Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan		557.84	488.26			
7				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	2	5	2	2	2	2	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya		557.84	488.26			
8			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan		200000	0			
9													Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya		200000	0			
10													Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia		200000	0			
11													Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan		178242	173894			

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD						DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)						CATATAN/REKOMENDASI				
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD		SATUAN	2022	2023	2024
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						
12					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar								Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya		178242	173894		
13				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	2	2	2	2	2	2	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia		178242	173894		
14													Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan		0	76800		
15													Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya		0	76800		
16													Jumlah Kebutuhan Benih		19.37	16.58		
17													Jumlah Ketersediaan Alsintan		8	15		
18													Jumlah Ketersediaan Pestisida		0	0		
19													Jumlah ketersediaan pupuk		0	0		
20													Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian		0	0		
21													Jumlah Sebaran Alsintan		12	532		
22													Jumlah Sebaran Pestisida		0	0		
23				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan, Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Sebaran pupuk		0	0		
24		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian		2	2		
25													Jumlah Pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.		-	-		
26													Jumlah Sebaran Kondisi Alsintan : (Baik dan Rusak)		-	-		
27													Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi)		0	0		

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					CATATAN/REKOMENDASI	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023		2024
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						
28													Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan		240	260		
29				Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik		148	0		
30													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak		0	0		
31			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian										Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura		855	3		
32				Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik		855	0		
33													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak		696	0		
34													Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura		0	0		
35				Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	0	1	1	0	0	0	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik		3	7		
36													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak		0	0		
37													Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan		25	30		
38													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik		6	5		
39													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak		0	0		

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD						DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)							CATATAN/REKOMENDASI								
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN		2022	2023	2024					
							T0	T1	T2	T3	T4	T5											
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	0	1	1	0	0	0	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan		0	0							
41													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi baik							0	0		
42													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi rusak										
43													Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan										
44													Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan dalam kondisi baik										
45				Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura		1	1							
46													Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan							1	0		
47													Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan										
48													Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan										
49													Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura										
50													Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan										

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					CATATAN/REKOMENDASI	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN							NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023		2024
							T0	T1	T2	T3	T4	T5							
51	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola		7000	7180			
52											Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani		7000	7180					
53				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola		1728	1886			
54													Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		4	4			
55				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	3	3	3	3	3	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian		2	2			
56													Jumlah Eksisting Sarana Pendukung		0	0			
57													Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun		0	14			
58													Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi		0	14			
59													Jumlah Sarana Pendukung dibangun		0	0			
60													Jumlah Sarana Pendukung direhabilitasi		0	0			
61													Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura		0	0			
62													Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani		0	0			

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD						DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)							CATATAN/REKOMENDASI		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN										
							T0	T1	T2	T3	T4	T5					
63	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	2500	10200	10200	10200	10200	10200	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan		100	100		
64												Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani		100	100		
65												Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan		5.598.023	0		
66												Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani		2753.03	0		
67			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	100	100	200	200	200	200	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura		0	0		
68												Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani		0	0		
69												Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan		0	0		
70												Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani		0	0		
71												Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan		0	0		
72												Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani		0	0		
73				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	24	8	24	24	24	24	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi		1	1	
74													Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN		677	733	

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					CATATAN/REKOMENDASI					
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023		2024				
							T0	T1	T2	T3	T4	T5										
75		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	225	90	90	90	90	90	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan		210	330						
76											Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi		11	75								
77			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	379	36	36	36	36	36	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan		21650	21965						
78			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	2	2	3	3	3	3	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen korporasi petani yang mendapatkan pendampingan		173	171						
79				Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	2	2	2	2	2	2	Jumlah Korporasi Petani		173	171						
80			Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jenis promosi pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		1	1						
81												Jumlah promosi pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		1	1							
82							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan							Jumlah Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			0	0	
83																Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			1	1		
84																Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			0	0		
85		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi										Jumlah Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		1	1							

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					CATATAN/REKOMENDASI		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023		2024	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5							
86	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		1	1			
87														Konsumsi per kapita per tahun		-	-		
88				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1	1	1	1	1		Data direktori konsumsi pangan		89.4	88.9		
89														Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		1	1		
90							Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1		Konsumsi per kapita per tahun		-
91														Data direktori konsumsi pangan		89.4	88.9		
92				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0	0			
93				Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jenis pangan lokal		0	0			
94								Jumlah pelaku usaha pangan lokal		0	0								
95				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala		0	0			
96				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala		0	0		
97									Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala		0	0							
98									Jumlah pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)		0	0							
99									Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar		15	14							
100				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala		0	0		
101									Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala		0	0							
102									Data Jumlah Penduduk		0	0							

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					CATATAN/REKOMENDASI	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023		2024
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						
103				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Data Konsumsi Pangan		102.4	102.2		
104													Data Perdagangan Antar Wilayah		0	0		
105													Data Produksi Pangan		213557	205973		
106													Data Stok Pangan		1	1		
107													Data Jumlah Penduduk		0	0		
108				Data Konsumsi Pangan		102.4	102.2											
109				Data Perdagangan Antar Wilayah		0	0											
110				Data Produksi Pangan		213557	205973											
111				Data Stok Pangan		1	1											
112				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	75	85	50	50	50	50	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah		12.5	0	
113		PROGRAM PENANGANAN KERAJANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi		0	0		
114			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		-	-		
115													Indeks Ketahanan Pangan Level Kecamatan		13	13		
116		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	80	43	90	90	95	95	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun		86	77		
117													Jumlah izin edar PSAT PD per tahun		5	2		
118				Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	3	4	4	5	Jumlah izin rumah pengemasan per tahun		1	0		
119													Jumlah health certificate (HC) per tahun		0	0		
120	Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun													2	5			